

**IMPLEMENTASI PROGRAM JARING (JANGKAU, SINERGI, DAN
GUIDELINE) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT NELAYAN DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016**

(Skripsi)

**Oleh
Serli Ani**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM JARING (JANGKAU, SINERGI, DAN GUIDELINE) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PROVINSI LAMPUNG

**Oleh
Serli Ani**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Program Jaring di Provinsi Lampung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kondisi alam yang tidak menentu, tingkat pendidikan nelayan yang rendah, pola kehidupan nelayan, pemasaran hasil tangkap

Penelitian ini menggunakan pendekatan model implementasi Van Meter dan Van Horn, yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik, dan Disposisi Implementor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Program Jaring sudah berjalan dengan cukup efektif walaupun masih ditemukan sedikit kendala serta masalah dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan van Meter dan van Horn, maka dapat dianalisis bahwa pelaksanaan Program Jaring sudah berjalan dengan sebagaimana yang telah ditetapkan, walaupun masih ada beberapa indikator yang belum sesuai dengan keadaan di lapangan.

Untuk itu diperlukan dibuatnya standar kebijakan yang lebih jelas dan rinci, perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dan finansial, perlu adanya perluasan sosialisasi, perlu dibuatnya forum komunikasi dan dialog antara *stakeholder* dan perwakilan masyarakat nelayan ataupun tokoh masyarakat untuk menghilangkan isu-isu negatif tentang program Jaring.

Kata kunci: implementasi, program jaring, kesejahteraan, masyarakat nelayan.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION NET PROGRAMS (REACN, SYNERGY AND GUIDELINES) TO IMPROVE THE WELFARE OFFISHERMEN IN THE PROVINCE OF LAMPUNG

**By
Serli Ani**

This study attempts to describe how have program net program in the lampung. This research supported by the natural environment erratic, the level of education fishermen low, the life patterns of the fishermen, marketing are caught

This research is used Van Meter and Van Horn's approach of implementation model which consist of Standard and Policy Goals, Resources, Relationship Among The Organizations, Characteristics of Implementer Agent, Condition of Social, Economic and Politic and Disposition of Implementer. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used were interviews, observation and documentations. Furthermore, to see the utilization of the regulation, the research applies triangulation technique.

The result is that the net program has been quite effective though there were a little obstacles and problem in practice. Using approach van meters and van horn, it can be analyzed that the implementation of net program has been running as determined, although there are still some indicator not based on the situation on the ground.

It took his policy standard clearer and detailed, it needs the increase in human resources and financial, it needs the expansion, should be made the communication and dialogue between stakeholders and fishermen or community representatives community leaders to deprive isu-isu negative about net program.

Keywords: implementation, net programs, welfare, a fishing community.

**IMPLEMENTASI PROGRAM JARING (JANGKAU, SINERGI, DAN
GUIDELINE) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT NELAYAN DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016**

**Oleh
Serli Ani**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

pada

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

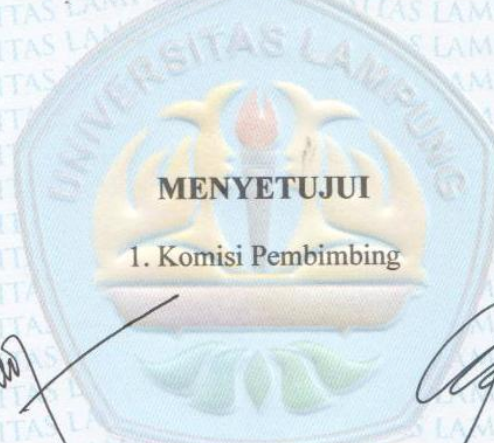
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM JARING
(JANGKAU, SINERGI, DAN *GUIDELINE*) DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT NELAYAN DI PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2016**

Nama Mahasiswa : **Serfi Ani**

No. Pokok Mahasiswa : 1216041097

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Eko Badi Sulistio, S.Sos., M.AP.
NIP 19780923 200312 1 001

Nana Mulyana, S.IP., M.Si.
NIP 19710615 200501 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.

Sekretaris : Nana Mulyana, S.IP., M.Si.

Penguji Utama : Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 01 Maret 2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung 1 Maret 2017

Yang membuat pernyataan,



Serli Ani

NPM 1216041097

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Serli Ani Lampung, Pekalongan pada tanggal 10 Oktober 1994. Penulis merupakan anak Ke-pertamadari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Syamsuri dan Ibu Sujiyem

Memulai jenjang pendidikan dari Taman Kanak – Kanak (TK)PJ KA Prabumulih Timurtahun 2000. Selanjutnya pada tahun 2006 menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 24 Prabumulih Timur Selanjutnya pada tahun 2009 menyelesaikan pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Prabumulih timur. Kemudian penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N)1Prabumulih Timur.

Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Penulis diterima melalui Jalur Undangan dan tergabung dalam himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) dan FSPI (Forum Study Pendidikan islam). Pada tahun 2015 di pertengahan bulan Januari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Serdang Kuring Kec. Way Kanan Kel. Bahuga.

MOTTO

❖ Hidup ini bagai skripsi, banyak bab dan revisi yang harus dilewati. Tetapi akan selalu berakhir indah, bagi mereka yang pantang menyerah.
(Shitlicious)

❖ We will share happiness and sadness together since we started together so we must stay together
(elf to super junior)

❖ Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu, selepas banyak kesabaran yang kamu jalani, yang akan membuatmu terpana, hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit
(Ali bin Abi Thalib)

❖ Libatkan Allah dalam segala apapun

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT
Ku persembahkan karya sederhana ini untuk:*

Bapak dan Mamak danadekku tercinta

*Yang selalu memberikan dukungan dan semangat
Terima kasih atas cinta, kasih sayang, kesabaran,
keikhlasan, dan doa dalam menanti keberhasilanku.*

*Keluarga besarku, sahabat, teman – temanku yang selalu
memberikan dukungan, semangat dan doa kepadaku.*

Para pendidik dan Almamater Universitas Lampung.

SANWACANA

Assalamualaikum Wr Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin tercurah segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia- Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sang motivator bagi penulis untuk selalu ikhlas dan bertanggung jawab dalam melakukan segala hal. Atas segala kehendak dan kuasa Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, Guideline) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Provinsi Lampung”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis telah berupaya sebaik mungkin dan seminimal mungkin namun apabila pembaca menemukan kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada pihak – pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos. M.Ap selaku pembimbing Utama. Terima kasih untuk ilmu, saran, waktu, nasehat, dan bimbingannya yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga Penulis menjadi giat untuk lebih cepat menyelesaikan skripsi ini. Satu hal yang selalu di sampaikan agar selalu berusaha dan jangan cepat menyerah.
2. Bapak Nana Mulyana S.Ip.M. Si selaku pembimbing kedua penulis. Terima kasih untuk ilmu, saran, waktu, nasehat, dan bimbingannya yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga Penulis menjadi giat untuk lebih cepat menyelesaikan skripsi ini. Satu hal yang selalu di sampaikan agar selalu berusaha dan jangan cepat menyerah.
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si selaku pembahas dan penguji bagi Penulis sekaligus selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara . Terima kasih atas saran, ilmu, dan motivasi yang bermanfaat bagi Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
5. Ibu Devi Yulianti, S.A.N., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terima kasih untuk saran, nasihat, motivasi dan ilmu bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis untuk memotivasi penulis untuk menjadi lebih baik mencapai kesuksesan.
6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP UNILA (Bapak Prof. Dr Yulianto, M.S, Bapak Dr. Bambang Utoyo, M.Si, Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si, Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si, Bapak Syamsul Ma'arif, S.IP., M.SI, Ibu Dewie Brima Atika, S.IP.,M.Si, Ibu Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP, Bapak Fery Triatmojo, S. A.N., M.AP, Ibu Suasana Indriyati,

S.IP., M.SI, Ibu Meliayana, S.IP., M.A, Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N. M.A Ibu Selvi Diana, dan Pak Izul). Terima kasih atas segala ilmu yang telah penulis peroleh di kampus semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis ke depannya.

7. Ibu Nur selaku Staf jurusan Ilmu Administrasi Negara yang cantik, ramah, dan memberikan pelayanan bagi penulis yang berkaitan dengan administrasi dalam penyusunan skripsi ini
8. Segenap informan penelitian Ibu Indah (Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung), Ibu Rita (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung), Bapak redy apidika (Perbankan Provinsi Lampung) dan bapak mantan penelitian pak Andry BPS (Badan Pusat Statistik) Pringsewu, Bapak Supriyanto wakil Dinas Pendidikan Pringsewu, bapak yang baik, ramah, walaupun tidak berlanjut ke tahap selanjutnya tetapi telah banyak membantuk penulis dalam menyelesaikan skripsiku, semoga kebaikan bapak” di balas sama Allah SWT.
9. Keluarga besarku yang di Pekalongan. Terima kasih atas kebersamaan, doa, motivasi, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga nasihat yang telah diberikan dpat bermanfaat bagi penulis.
10. Sahabatku dari masa SD, Mts, SMA hingga sekarang. Dwinta sari hasana S.Pd, Dede Junarko A.Md, Viona Yolanda (vivi) S.A.P, Prihatini bella S.Pd, Lia, Eka Brawita S.Pd, Dyan Try Siska S.pd Terima kasih atas waktu, cerita, canda tawa yang telah kalian berikan kepada penulis. Tetap semangat buat kuliah kalian, pekerjaan kalian guys. Semoga persahabatan kita selalu terjalin sampai kita tua nanti aamiin.

11. Sabahatku wanita kece Dafriesnatri (Dara virzinnia S.A.N, Frisca Dilijana Newyerani Nababan S.A.N , Putri Wulandari S.A.N dan Purnama Sari T.). terima kasih banyak untuk kebersamaan, dukungan, motivasi, nasihat, canda tawa, pengalaman, waktu, doa yang telah kalian berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pertemanan yang sudah seperti saudara ini tidak akan penulis lupakan sampai kapanpun. Kalian juga menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berusaha , cepat menyelesaikan skripsi sehingga mencapai gelar S1. Semoga silaturahmi pertemanan dan persahabatan kita akan selalu terjalin sampai kita tua nanti aamiin. Selalu semangat dafriesnatri untuk mencapai kesuksesan di dunia dan diakhirat ke depan dan selalu berbahagia ☺
12. Buat keluarga pertamakku di Universitas Lampung Bringin Albar Dias Novandi S.H, Kkhusnul Khotimah S.Pd , Icni Poppy S.Si, Sukanto S.Si, Radisty Noovizir S.A.B, biarpun kita awalnya berteman dari grup maba 2012, kalian itu bagi ku orang lain tapi udah kayak keluargaku sendiri.
13. Buat anak kosan Rumah Pulau biru Rika Aprilia S.E, Novia Setya Ningrum, Zahra maria Ulfa, Endah Ning Ayutias makasih banyak buat kalian selama buat doa nya, motivasi, buat selalu ada nya, canda tawa kalian yang buat aku gak jadi galau mikirin skripsi ini, semangat buat adek nove, zahra, endah kuliah nya jangan pernah nyerah dan putus asa ingat allah selalu bersama kita.
14. Buat Bery Decky Saputra, Juanda, Putu indra jaya, tante Romilda (kokom), Ayu Septiani, Mery Larasati, Betty Indah Rahmawati, Silvia Tika, Melda Budiarti, Oliva Valerin, Stefani Wulandari, Kak Sabbir Sobirin, Bj Sedy Pratama, Arinta Fitriani Agnes, Fitri, Rahma, Fajar Adi, Rindu, Desti, Pepah. terima kasih atas bantuan, motivasi nya bagi penulis untuk terus berusaha ,

cepat menyelesaikan skripsi sehingga mencapai gelar S1.semoga kebaikan kalian di balas sama Allah SWT.

15. Terima kasih buat teman – teman seperjuangan ANE 2012 (AMPERA) Aris, Ageng, Alga Devicho, Ahmad Sulaiman, Anis Rahmawati, Anis Dubipata, Ajeng, Ageng, Akbar Hari Wijaya, Alfajar, Ali Firdaus, Andre Pratama, Guruh, Ayu Tsanita, Ayu Widya Puspita, Bayu Kurniawan, Chairani Salamah, Dewi, Dian, Dwini,Dianisa,Herlina, Emi Marta, Endry Ardiyanto, Ernawati, Fadilla Nuari, Firdalia, Fitri Rustiana,Ghea,Ica Yulita, Imam Khoirudiin, Ikhsan, Ikhwani, Iyaji, Siti Muslimah, Intan, Johansyah, Kiki, Kirana, Lena, Lianse, Antonia, si kembar Icup dan Ipul, Alan, Irlan, Maya, Rezki Anantama, Mutiara, Melisa, Eko, Nadiril, Novaria, Novita Sari, Rifky Andriansyah, Rifky Hidayatur Rahaman, Richa Mollytha, Sholeh Ridlwan, Omega, Quqila, Rhani Umay, Ria Shellawati, Ridha Ayu Amalia, Suci, Silvia Yolanda, Taufik, Widji Ramadhani, Yeen Gustiance, Yoanita, dan Yuyun. Terima kasih atas bantuan, kebersamaan, canda tawa, dukungan, dan pengalaman yang diberikan kepada penulis. Semoga pertemanan dan komunikasi kita selalu terjalin walaupun kita sudah lulus ☺ tetap semangat ampera sukses buat kita semua aamiin
16. Terima kasih untuk teman – teman KKN Desa Serdang Kuring Kec Way Kanan Kab. Bahuga, Utia Meylina S.H, Fery Irawan,Indri S.Hut, Inti, M. Reza Guntara S.E ,Odi, Al-Kausar dan papa mama nya, Terima kasih buat pengalaman 40 hari yang lucu”an, berkesan, dan yang tak terlupakan sampai kapanpun.

17. Abang dan mbak HIMAGARA: bang ciko, bang Aden, Bang rendi, mbak nindi, mbak manda, mbak farah, Bang Fajrin, Bang Datas, Bang Ali Terima kasih bang, mbak buat nasihat dukungan, dan bantuannya selama ini.
18. Para pembahas mahasiswa/i dan moderatorku dari proposal dan hasil (Purnama Sari T. Ayu Wulandari, Endry Ardinato,). Terima kasih banget telah udah meluangkan waktu nya untuk kritikkan dan saran yang kalian berikan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
19. Terima kasih untuk para Aparatur Desa Desa Serdang Kuring Kec Way Kanan Kab. Bahuga atas bantuannya selama 40 hari dalam menjalankan KKN, mama, bapak, adek , koko, rizky, frengky, dan warga Desa serdang kuringkec way kanan kab. Bahuga.
20. Keluarga besar Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama belajar di Universitas Lampung
21. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuannya.

Tidak ada kata yang lebih indah selain kata “terima kasih dan maaf” atas semua nya. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi saya berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua aamiin.

Bandar Lampung, 27 Febuari 2017
Penulis

Serli Ani
NPM: 1216041097

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Publik.....	17
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	17
2. Ciri-ciri umum Kebijakan	19
B. Tahap-Tahap Kebijakan Publik	20
1. Penyusunan Agenda.....	20
2. Formulasi Kebijakan.....	23
3. Adopsi/ Rekomendasi Kebijakan.....	23
4. Implementasi / Pelaksanaan Kebijakan.....	25
5. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan	26
C. Implementasi Kebijakan Publik.....	27
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	27
2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.....	31
D. Pengertian Program Jaring	41
1. Definisi & Tujuan Program.....	41
2. Target Dan Sasaran Program.....	41
3. Manfaat Program.....	43
E. Pemberdayaan Masyarakat	43
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	43
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	47
3. Tahap-Tahap Pemberdayaan	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	49
B. Fokus Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian	53
D. Informan Penelitian	54
E. Sumber Data	55
F. Teknik Pengumpulan Data	57
G. Teknik Analisis Data	59
H. Teknik Keabsahan Data	63

BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Provinsi Lampung	67
B. Nelayan	68
C. Otoritas Jasa Keuangan	73
D. Dinas kelautan Dan Perikanan	74
E. Perbankan (Bank Rakyat Indonesia)	75
F. Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline)	78

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan <i>Guideline</i>) Di Provinsi Lampung	86
B. Deskripsi Hasil Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelaksanaan Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan <i>Guideline</i>) Di Provinsi Lampung	88
1. Standar dan Sasaran Kebijakan	88
2. Sumber Daya	104
3. Hubungan Antar Organisasi	110
4. Karakteristik Agen Pelaksana	119
5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik	125
6. Disposisi Implementor	131
C. Pembahasan Hasil Penelitian Pemberdayaan Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan <i>Guideline</i>) di Provinsi Lampung	134
1. Standar dan Sasaran Kebijakan	134
2. Sumber Daya	137
3. Hubungan Antar Organisasi	140
4. Karakteristik Agen Pelaksana	143
5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik	144
6. Disposisi Implementor	146

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	149
B. Saran	151

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Bank Partner dan IKNB sampai dengan September 2015	6
2. Jumlah Masyarakat Nelayan Miskin di Indonesia	7
3. Rekapitulasi Daftar Kub Perikanan Tangkap Provinsi Lampung TA. 2015	11
4. Daftar Informan.....	55
5. Data Sekunder	56
6. Contoh Tabel Triangulasi Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan <i>Guideline</i>) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Provinsi Lampung	64
7. Jumlah Masyarakat Nelayan di Provinsi Lampung	67
8. Jumlah kartu tanda Nelayan Di Provinsi Lampung	98
9. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Di Provinsi Lampung.....	99
10. Profil Agen Peaksana	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Analisis Data Model Interaktif	62
2. Fungsi Bank Menyalurkan Dana Masyarakat	76
3. Logo Program Jaring Jangkau, Sinergi, dan <i>Guideline</i>) Di Provinsi Lampung	88
4. Antarian yang panjang masyarakat nelayan di Provinsi Lampung yang meminjamkan modal usahanya di bank	105
5. Teller Menjelaskan Syarat-Syarat Peminjaman Modal Usaha Di Bank (BRI)	114
6. Kegiatan Focus Group Discussion Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan <i>Guideline</i>)	119
7. Struktur Birokrasi Agen Pelaksana	121
8. Model Hubungan Antar Organisasi	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri atas laut yang luas dan pulau-pulau disekitarnya sehingga Indonesia dijuluki Negara Maritim dengan sumber daya alam yang melimpah didalamnya. Sebagai negara maritim, Indonesia termasuk sebagai negara penghasil perikanan terbesar di Asia Tenggara yang hasil dari perikanan tersebut cukup dinantikan oleh negara lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat baik dari kuantitas maupun kualitasnya pengelolaan hasil perikanan. Hal itu, menunjukkan bahwa menjanjikan dalam bisnis

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan sumber daya alam yang cukup melimpah terutama di bidang kelautan, potensi ini berada di ujung pulau Sumatra yang dikelilingi oleh laut, untuk Ibu Kota Provinsi sendiri yaitu Kota Bandar Lampung dengan hasil perikanan mampu mencapai 23.665,84 ton/tahun setelah Kabupaten Lampung Selatan sebesar 35.476,26 ton/tahun dan Lampung Timur sebesar 37.520,67 ton/tahun (Badan Pusat statistik, 2012).

Selain sebagai penghasil ikan terbesar, sebagian besar wilayah perairan laut di provinsi Lampung juga merupakan penghasil udang terbesar. Namun, Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dari sumber daya kelautan masih belum mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Masyarakat Provinsi Lampung yang belum merasakan pertumbuhan ekonomi yang maksimal dari adanya kekayaan sumber daya alam di bidang kelautan tersebut adalah para nelayan. Para nelayan Provinsi Lampung memiliki areal penangkapan yang berbeda-beda. Hal ini berdasarkan pada armada yang dimiliki oleh setiap para nelayan. Area penangkapan ikan para nelayan adalah di sekitar Teluk Lampung dan juga sekitaran perairan Selat Sunda.

Kondisi kehidupan nelayan dalam memenuhi kebutuhan perekonomian masih sangat sulit. Hal ini dikarenakan aktivitas para nelayan bergantung pada kondisi alam untuk dapat melakukan kegiatan perekonomian. Hal ini banyak menyebabkan masyarakat di daerah pesisir yang hanya memiliki mata pencarian sebagai nelayan akan mengalami kondisi perekonomian yang sangat minim dan lebih banyak berada di garis kemiskinan. Masyarakat nelayan berada di garis kemiskinan dikarenakan beberapa permasalahan yaitu:

1. Kondisi alam yang tidak menentu.
2. Tingkat pendidikan nelayan. Kehidupan para nelayan di daerah pesisir lebih besar belum tersentuh dengan teknologi moderen. Hal ini juga berpengaruh terhadap sumber daya manusia yang masih rendah dan pada hasil tangkapan yang belum optimal.
3. Pola kehidupan nelayan. Nelayan memiliki pola hidup konsumtif. Lebih banyak para nelayan lebih mengutamakan kebutuhan sekunder.

4. Pemasaran hasil tangkapan. Tidak semua daerah pesisir memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hal tersebut membuat para nelayan terpaksa untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak dengan harga di bawah harga pasar

Keempat permasalahan pokok tersebut membuat para nelayan berada pada garis kemiskinan. Para nelayan juga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya dalam melaut selain karena kondisi cuaca juga dikarenakan larangan konsumsi jenis BBM tertentu untuk kapal di atas 30 GT (surat BPH Migas No. 29/07/KA.BPH/2014 Tanggal 15 Januari 2014). Tentu saja hal ini mempersulit masyarakat nelayan untuk memperoleh kesejahteraan hidupnya dalam memanfaatkan sumber daya laut sebagai mata pencaharian pokok. (Sumber: <http://seputarlampung.co.id/program-jaring-untuk-pengembangan-kelautan-dan-perikanan/>. Diakses pada tanggal: 5/10/2015/16.00)

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pemerintah mengambil langkah untuk mengetaskan kemiskinan masyarakat nelayan dengan mengeluarkan dan menerapkan Program Jaring. Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*) adalah inisiatif jangka pendek OJK dan KKP untuk menjangkau sektor kelautan dan perikanan, yang bersinergi dengan Pelaku Jasa Keuangan (PJK) untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan. Dalam program ini melibatkan beberapa bank seperti pihak OJK yang merupakan pihak yang membentuk program jaring tersebut, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang memiliki tugas mencari nasabah dalam program jaring, serta pihak perbankan yang memiliki tugas di lapangan dalam program tersebut.

Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*) juga merupakan salah satu program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor Kelautan dan Perikanan. Sasaran utama Program Jaring adalah peningkatan pertumbuhan pembiayaan di sektor Kelautan dan Perikanan (KP) dengan target pertumbuhan pembiayaan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Target pertumbuhan kredit ditetapkan tumbuh minimal 50% dari tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit sebelum adanya program jaring. Selain itu, diharapkan Program Jaring dapat meningkatkan pemahaman Sektor Jasa Keuangan (SJK) terhadap bisnis sektor KP lebih baik, memperbaiki tingkat kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha mikro dan kecil (Peningkatan *Income* per kapita), menambah jumlah lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sosialisasi terkait Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) ini sudah dilakukan di Provinsi Lampung lebih tepatnya di Bandar Lampung yaitu di Lempasing dan Panjang. Khususnya sosialisasi ini untuk nelayan yang ada di Provinsi Lampung. Kegiatan dalam Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*) ini untuk Para Bank (BNI, BRI, Mandiri, Danamon, BTPN, Permata, Bukopin, SulSelBar) mencakup *monitoring* realisasi kredit baru Bank Partner ke sektor Kelautan dan Perikanan, pertukaran informasi antara OJK, KKP, dan bank Partner, pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) di Jakarta pada awal November 2015 mengenai strategi mitigasi resiko bisnis sektor kelautan dan perikanan dalam memetakan permasalahan dan solusi untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan, serta penyusunan *Grand Design* Program Jaring.

Program Jaring di Provinsi Lampung dilaksanakan mulai bulan Mei 2015 dengan sasaran masyarakat nelayan di Provinsi Lampung. Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*) tersebut menjadi strategi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam meningkatkan kesejahteraan di Provinsi Lampung. Akan tetapi pada kenyataannya Program Jaring ini masih banyak kekurangan seperti masih ada nelayan yang tidak bisa mengakses Program Jaring, minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) sehingga masyarakat masih merasakan sulit dalam hal prosedur dan syarat yang harus dipenuhi.

Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*) juga terlihat dari selain itu, jika melihat dalam pelaksanaannya, pencapaian target pelaksanaan Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*) belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari data Bank Mitra pemerintah yang memberikan pinjaman serta yang dijadikan mitra oleh pemerintah (BRI, BNI, Danamon, Mandiri, Permatya, Bukopin, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN), dan PT BPD Sulselbar, yang memberikan pinjaman pada nelayan. Berikut adalah tabel terkait perkembangan pelaksanaan Program Jaring oleh 8 bank partner dan IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) sampai dengan September 2015 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Bank Partner dan IKNB sampai dengan September 2015

Laporan Realisasi Penyaluran s.d Bulan September 2015 dalam satuan miliar Rupiah					
No	Nama Bank Partner	Nominal Komitmen 2015	Growth Komitmen 2015 (%) Dibanding Outstanding Des 2014	Penyaluran Kredit Kp Sampai Septeber 2015	Share Penyaluran Kredit Kp Thd Total Komitmen Tahun 2015 (%)
	1	2	3	4	5 = (4/2)*100%
1.	BRI	2,500	52,00%	2,919.09	116,76%
2.	BNI	1,000	94,88%	393.95	39.39%
3.	MANDIRI	1,250	81.70%	624.00	49.92%
4.	DANAMON	300	94.64%	107.31	35.77%
5.	BTPN	50	50.66%	221.99	443.98%
6.	PERMATA	180	56.25%	50.00	27.78%
7.	BUKOPIN	81	91.01%	62.37	77.00%
8.	SULSELBAR	13	19.52%	32.59	250.67%
	TOTAL	5,374	67.83%	4,411.29	82.09%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Tahun Mei–September 2015

Berdasarkan tabel 1, menjelaskan bahwa realisasi penyaluran kredit baru (*gross*) ke sektor KP oleh Bank partner sampai dengan akhir September 2015 telah mencapai Rp 4,41 triliun atau 82,09% dari target agregat 8 bank Partner sebesar Rp 5,37 triliun. Beberapa bank yang telah mencapai dan melebihi target penyaluran kredit gross adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI), PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN), dan PT BPD Sulselbar. Selain itu, masih banyak bank yang belum menjalankan tugasnya untuk mencapai target, diantaranya yaitu Bank BNI, Danamon, Mandiri, BTPN, Permata, Bukopin.

Peneliti mengambil kesimpulan untuk menjadikan Bank BRI sebagai salah satu study dalam pengimplementasian Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Provinsi Lampung, karena Bank BRI merupakan Bank yang lokasi mudah dijangkau oleh

masyarakat nelayan di Provinsi Lampung, dan di buktikan juga dari tabel. 1 bahwasanya Bank BRI yang mencapai target melebihi dari target yang ditentukan.

Adapun Kelompok Usaha Bersama (KUB) masyarakat nelayan Provinsi Lampung yang menjadi target sasaran dari Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*) di Provinsi Lampung.

Tabel 2. Jumlah Masyarakat Nelayan Miskin di Indonesia

No.	Nama Provinsi	Jenis Perairan	Tahun	Jumlah	Provinsi ID
1	Aceh	Laut	2012	36,353	11
2	Sumatera Utara	Laut	2012	141,091	12
3	Sumatera Barat	Laut	2012	29,448	13
4	Riau	Laut	2012	36,438	14
5	Kepulauan Riau	Laut	2012	84,423	21
6	Jambi	Laut	2012	7,686	15
7	Sumatera Selatan	Laut	2012	15,614	16
8	Kepulauan Bangka Belitung	Laut	2012	39,343	19
9	Bengkulu	Laut	2012	17,200	17
10	Lampung	Laut	2012	9,893	18
11	Banten	Laut	2012	20,725	36
12	DKI Jakarta	Laut	2012	58,805	31
13	Jawa Barat	Laut	2012	74,729	32
14	Jawa Tengah	Laut	2012	33,213	33
15	DI Yogyakarta	Laut	2012	1,977	34
16	Jawa Timur	Laut	2012	184,311	35
17	Bali	Laut	2012	31,050	51
18	Nusa Tenggara Barat	Laut	2012	47,388	52
19	Nusa Tenggara Timur	Laut	2012	20,227	53
20	Kalimantan Barat	Laut	2012	24,316	61
21	Kalimantan Tengah	Laut	2012	10,596	62
22	Kalimantan Selatan	Laut	2012	20,697	63
23	Kalimantan Timur	Laut	2012	55,352	64
24	Sulawesi Utara	Laut	2012	21,931	71
25	Gorontalo	Laut	2012	10,015	75
26	Sulawesi Tengah	Laut	2012	50,579	72
27	Sulawesi Selatan	Laut	2012	108,988	73
28	Sulawesi Barat	Laut	2012	11,931	76
29	Sulawesi Tenggara	Laut	2012	26,699	74
30	Maluku	Laut	2012	52,875	81
31	Maluku Utara	Laut	2012	6,888	82
32	Papua	Laut	2012	23,824	94

No.	Nama Provinsi	Jenis Perairan	Tahun	Jumlah	Provinsi ID
33	Papua Barat	Laut	2012	7,298	91
34	Aceh	Laut	2012	23,714	11
35	Sumatera Utara	Laut	2012	39,632	12
36	Sumatera Barat	Laut	2012	5,834	13
37	Riau	Laut	2012	7,976	14
38	Kepulauan Riau	Laut	2012	19,728	21
39	Jambi	Laut	2012	5,651	15
40	Sumatera Selatan	Laut	2012	12,511	16
41	Kepulauan Bangka Belitung	Laut	2012	29,508	19
42	Bengkulu	Laut	2012	1,585	17
43	Lampung	Laut	2012	18,248	18
44	Banten	Laut	2012	6,049	36
45	DKI Jakarta	Laut	2012	1,593	31
46	Jawa Barat	Laut	2012	10,157	32
47	Jawa Tengah	Laut	2012	48,353	33
48	DI Yogyakarta	Laut	2012	1,221	34
49	Jawa Timur	Laut	2012	26,930	35
50	Bali	Laut	2012	13,596	51
51	Nusa Tenggara Barat	Laut	2012	15,364	52
52	Nusa Tenggara Timur	Laut	2012	12,866	53
53	Kalimantan Barat	Laut	2012	23,993	61
54	Kalimantan Tengah	Laut	2012	11,628	62
55	Kalimantan Selatan	Laut	2012	22,490	63
56	Kalimantan Timur	Laut	2012	56,384	64
57	Sulawesi Utara	Laut	2012	26,082	71
58	Gorontalo	Laut	2012	4,438	75
59	Sulawesi Tengah	Laut	2012	49,127	72
60	Sulawesi Selatan	Laut	2012	-	73
61	Sulawesi Barat	Laut	2012	33,668	76
62	Sulawesi Tenggara	Laut	2012	40,884	74
63	Maluku	Laut	2012	22,202	81
64	Maluku Utara	Laut	2012	2,997	82
65	Papua	Laut	2012	27,056	94
66	Papua Barat	Laut	2012	16,775	91
67	Aceh	Laut	2012	4,901	11
68	Sumatera Utara	Laut	2012	3,028	12
69	Sumatera Barat	Laut	2012	3,105	13
70	Riau	Laut	2012	3,697	14
71	Kepulauan Riau	Laut	2012	9,146	21
72	Jambi	Laut	2012	2,169	15
73	Sumatera Selatan	Laut	2012	5,238	16
74	Kepulauan Bangka Belitung	Laut	2012	12,354	19
75	Bengkulu	Laut	2012	481	17
76	Lampung	Laut	2012	8,229	18
77	Banten	Laut	2012	875	36
78	DKI Jakarta	Laut	2012	1,415	31
79	Jawa Barat	Laut	2012	13,224	32
80	Jawa Tengah	Laut	2012	18,464	33
81	DI Yogyakarta	Laut	2012	140	34

No.	Nama Provinsi	Jenis Perairan	Tahun	Jumlah	Provinsi ID
82	Jawa Timur	Laut	2012	15,062	35
83	Bali	Laut	2012	9,591	51
84	Nusa Tenggara Barat	Laut	2012	8,498	52
85	Nusa Tenggara Timur	Laut	2012	11,167	53
86	Kalimantan Barat	Laut	2012	9,412	61
87	Kalimantan Tengah	Laut	2012	4,937	62
88	Kalimantan Selatan	Laut	2012	9,005	63
89	Kalimantan Timur	Laut	2012	25,305	64
90	Sulawesi Utara	Laut	2012	17,848	71
91	Gorontalo	Laut	2012	4,528	75
92	Sulawesi Tengah	Laut	2012	25,496	72
93	Sulawesi Selatan	Laut	2012	-	73
94	Sulawesi Barat	Laut	2012	4,803	76
95	Sulawesi Tenggara	Laut	2012	11,838	74
96	Maluku	Laut	2012	49,817	81
97	Maluku Utara	Laut	2012	6,722	82
98	Papua	Laut	2012	10,958	94
99	Papua Barat	Laut	2012	6,792	91
100	Aceh	Umum	2012	3,452	11
101	Sumatera Utara	Umum	2012	13,205	12
102	Sumatera Barat	Umum	2012	3,671	13
103	Riau	Umum	2012	8,125	14
104	Kepulauan Riau	Umum	2012	-	21
105	Jambi	Umum	2012	7,412	15
106	Sumatera Selatan	Umum	2012	8,566	16
107	Kepulauan Bangka Belitung	Umum	2012	-	19
108	Bengkulu	Umum	2012	4,779	17
109	Lampung	Umum	2012	4,669	18
110	Banten	Umum	2012	696	36
111	DKI Jakarta	Umum	2012	-	31
112	Jawa Barat	Umum	2012	5,724	32
113	Jawa Tengah	Umum	2012	38,286	33
114	DI Yogyakarta	Umum	2012	60	34
115	Jawa Timur	Umum	2012	13,745	35
116	Bali	Umum	2012	4,163	51
117	Nusa Tenggara Barat	Umum	2012	2,398	52
118	Nusa Tenggara Timur	Umum	2012	-	53
119	Kalimantan Barat	Umum	2012	7,696	61
120	Kalimantan Tengah	Umum	2012	21,433	62
121	Kalimantan Selatan	Umum	2012	33,942	63
122	Kalimantan Timur	Umum	2012	31,218	64
123	Sulawesi Utara	Umum	2012	2,538	71
124	Gorontalo	Umum	2012	1,425	75
125	Sulawesi Tengah	Umum	2012	740	72
126	Sulawesi Selatan	Umum	2012	1,378	73
127	Sulawesi Barat	Umum	2012	-	76
128	Sulawesi Tenggara	Umum	2012	2,161	74
129	Maluku	Umum	2012	7	81
130	Maluku Utara	Umum	2012	-	82

No.	Nama Provinsi	Jenis Perairan	Tahun	Jumlah	Provinsi ID
131	Papua	Umum	2012	6,926	94
132	Papua Barat	Umum	2012	374	91
133	Aceh	Umum	2012	269	11
134	Sumatera Utara	Umum	2012	5,673	12
135	Sumatera Barat	Umum	2012	5,829	13
136	Riau	Umum	2012	8,497	14
137	Kepulauan Riau	Umum	2012	-	21
138	Jambi	Umum	2012	446	15
139	Sumatera Selatan	Umum	2012	23,004	16
140	Kepulauan Bangka Belitung	Umum	2012	-	19
141	Bengkulu	Umum	2012	395	17
142	Lampung	Umum	2012	1,758	18
143	Banten	Umum	2012	163	36
144	DKI Jakarta	Umum	2012	-	31
145	Jawa Barat	Umum	2012	4,089	32
146	Jawa Tengah	Umum	2012	1,422	33
147	DI Yogyakarta	Umum	2012	125	34
148	Jawa Timur	Umum	2012	7,084	35
149	Bali	Umum	2012	89	51
150	Nusa Tenggara Barat	Umum	2012	300	52
151	Nusa Tenggara Timur	Umum	2012	-	53
152	Kalimantan Barat	Umum	2012	2,992	61
153	Kalimantan Tengah	Umum	2012	14,398	62
154	Kalimantan Selatan	Umum	2012	27,456	63
155	Kalimantan Timur	Umum	2012	33,672	64
156	Sulawesi Utara	Umum	2012	1,657	71
157	Gorontalo	Umum	2012	327	75
158	Sulawesi Tengah	Umum	2012	493	72
159	Sulawesi Selatan	Umum	2012	7,513	73
160	Sulawesi Barat	Umum	2012	-	76
161	Sulawesi Tenggara	Umum	2012	1,900	74
162	Maluku	Umum	2012	-	81
163	Maluku Utara	Umum	2012	-	82
164	Papua	Umum	2012	3,024	94
165	Papua Barat	Umum	2012	155	91
166	Aceh	Umum	2012	127	11
167	Sumatera Utara	Umum	2012	2,704	12
168	Sumatera Barat	Umum	2012	4,874	13
169	Riau	Umum	2012	5,259	14
170	Kepulauan Riau	Umum	2012	-	21
171	Jambi	Umum	2012	1,756	15
172	Sumatera Selatan	Umum	2012	20,837	16
173	Kepulauan Bangka Belitung	Umum	2012	-	19
174	Bengkulu	Umum	2012	251	17
175	Lampung	Umum	2012	466	18
176	Banten	Umum	2012	70	36
177	DKI Jakarta	Umum	2012	-	31
178	Jawa Barat	Umum	2012	17,613	32
179	Jawa Tengah	Umum	2012	-	33

No.	Nama Provinsi	Jenis Perairan	Tahun	Jumlah	Provinsi ID
180	DI Yogyakarta	Umum	2012	2,701	34
181	Jawa Timur	Umum	2012	4,694	35
182	Bali	Umum	2012	76	51
183	Nusa Tenggara Barat	Umum	2012	391	52
184	Nusa Tenggara Timur	Umum	2012	-	53
185	Kalimantan Barat	Umum	2012	1,258	61
186	Kalimantan Tengah	Umum	2012	3,396	62
187	Kalimantan Selatan	Umum	2012	5,130	63
188	Kalimantan Timur	Umum	2012	4,380	64
189	Sulawesi Utara	Umum	2012	641	71
190	Gorontalo	Umum	2012	517	75
191	Sulawesi Tengah	Umum	2012	147	72
192	Sulawesi Selatan	Umum	2012	4,085	73
193	Sulawesi Barat	Umum	2012	-	76
194	Sulawesi Tenggara	Umum	2012	488	74
195	Maluku	Umum	2012	13	81
196	Maluku Utara	Umum	2012	-	82
197	Papua	Umum	2012	6,780	94
198	Papua Barat	Umum	2012	347	91
	Total			2,748,908	9,312

Sumber : bps.go.id, tanggal 06 2016 pukul 16.00

**Tabel 3. Rekapitulasi Daftar KUB (Kelompok Usaha Bersama)
Perikanan Tangkap Provinsi Lampung TA. 2015**

Kabupaten di Provinsi Lampung	Ibukota	Desa / Kelurahan	Jumlah Anggota	Jumlah Kub
Lampung Tengah	Gunung Sugih	1. Seputih Surabaya 2. Bandar Surabaya 3. Kalirejo 4. Kota Agung 5. Rumbia	1 1 1 1 1	5 KUB
Lampung Utara	Kotabumi			4 KUB
Lampung Selatan	Kalianda	1. Desa Sua 2. Sidomulyo	30 30	60 KUB
Lampung Barat	Liwa	0	0	0 KUB
Lampung Timur	Sukadana	1. Marga Sari 2. Sukorahayu 3. Karang Anyar 4. Sri Minosari	20 15 17 18	70 KUB
Mesuji	Wiralaga Mulya	0	0	0 KUB
Pesawaran	Gedong Tataan	1. Padang Cermin 2. Sido Makmur 3. Sido Dadi	3 3 3	21 KUB

Kabupaten di Provinsi Lampung	Ibukota	Desa / Kelurahan	Jumlah Anggota	Jumlah Kub
		4. Tambak Makmur 5. Cilimus 6. Teluk Pandan 7. Desa Bawang 8. Punduh Pidada	3 3 1 3 2	
Bandar Lampung	Tanjung Karang	1. Teluk Betung Selatan 2. Panjang 3. Teluk Betung Barat 4. Lempasing 5. Bumi Waras		32 KUB
Pringsewu	Pringsewu	0	0	0 KUB
Tanggamus	Kota Agung	1. Wonosobo 2. Teluk semaka	18 11	29 KUB
Tulang Bawang Barat	Tulang Bawang Tengah	1. Pagar dewa 2. Way kiri	2 1	3 KUB
Tulang Bawang	Menggala	1. Menggala 2. Dente Teladas 3. Gedung Meneng 4. Gedung Aji 5. Bandar Agung	4 3 2 3 4	16 KUB
Metro	Metro	0	0	0 KUB
Pesisir Barat		1. Karya Penggawa 2. Bengkumat 3. Bengkumat Belimbing 4. Pesisir Selatan	18 17 15 20	70 KUB
Way Kanan	Blambangan Umpu	0	0	0 KUB
Jumlah			310	310

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan,Tahun 2015

Menurut Mustofa dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI), yang berperan dari pihak Perbankan menuturkan pelaksanaan Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*) dalam hal target penyaluran kredit yang di berikan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Misalnya dana yang di luncurkan dari pihak OJK

(Otoritas Jasa Keuangan) sebesar 5 triliun dengan sasaran 10.000 orang tersebut, maka kira-kira masing nelayan mendapatkan pinjaman Rp500 Juta. Dari peminjaman tersebut bisa disalurkan dengan berbagai sistem Kredit mulai dari sistem Kredit Pinjaman Kemitraan, Kupedes, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), dan Kredit Komersial. Dengan berbagai macam sistem kredit tersebut bisa menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan. Misalnya Kupedes, Maksimal Pinjaman Sebesar Rp 200 Juta, untuk Kupedes Rakyat Rp 25 Juta, Kupedes Umum di atas Rp25 Juta, Kredit Pangan Rp500 Juta, dan Kredit Komersial di atas Rp500 juta. Untuk mengajukan peminjaman nelayan harus memenuhi syaratnya. (Sumber:Hasil wawancara:pada Senin 25/04/2016:13.12).

Berdasarkan wawancara dengan Yazid Muzak selaku ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Lampung. Dia menuturkan bahwa Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*) itu bagus, tapi dalam pelaksanaannya masih kurang baik, karena mekanisme pengembalian dana program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) yang disalurkan justru memberatkan nelayan. Sehingga masih ada para nelayan yang belum mengetahui program, belum lagi para nelayan masih susah untuk memperoleh Kartu Tanda Nelayan yang merupakan sebuah identitas menyatakan bahwa mereka benar-benar nelayan dengan masa berlaku 5 tahun. Para nelayan juga kesulitan ketika akan mencari pinjaman ke bank karena para nelayan hanya punya kapal sebagai jaminan. Selain itu, para nelayan dalam keseharian bekerja di laut hanya mendapatkan Rp40.000 rupiah dan itu sudah sama investasi kapal, beli bbmnya, dan lain-lain. **(Hasil wawancara, Pada Kamis, 07/04/2016)**

Selain masalah konsistensi, masalah kompetensi juga masih lemah, terutama yang terkait dengan kemampuan interval institusi dalam usaha pengembangan usaha kecil. Oleh karena itu suatu usaha rasional untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan adalah dengan memberikan mereka kegiatan yang dapat menghasilkan sebagai sarana pemberdayaan. Adapun konsep yang dipakai oleh yaitu konsep pemberdayaan. Pemberdayaan disini merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).

Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*) merupakan program dari pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan melalui program dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dalam penelitian ini peneliti fokus tentang bagaimana pengimplementasian Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*). Peneliti tertarik membahas Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*), pada aspek implementasi kebijakan publik, khususnya di lihat dari sasaran program. Hal ini mengingat Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*) merupakan salah satu program yang diperuntukan bagi masyarakat nelayan. Penelitian ini dilakukan karena peneliti sadar bahwa setiap kebijakan yang menyangkut masyarakat yang terkait dengan masalah prosedur, maupun dana yang menjadi hak masyarakat bawah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat nelayan.

Disini peneliti juga memfokuskan Implementasi kebijakan dari dimensi variabel-variabel yang terdapat dalam Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn diantaranya 1. tolak ukur tingkat keberhasilan dari Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*), 2. sumber daya dan sumber daya kebijakan (komunikasi), 3. Hubungan antar organisasi, 4. Karakteristik agen pelaksana (Komunikasi

organisasi formal dan informal, Cakupan atau wilayah), Struktur birokrasi, 5. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi, 6. Disposisi implementor.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik meneliti bagaimana **IMPLEMENTASI PROGRAM JARING (JANGKAU, SINERGI, DAN GUIDELINE) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah, yaitu **Bagaimana Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, Guideline) di Provinsi Lampung ditinjau dari Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn?**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*) sebagai salah satu upaya atau strategi pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan para nelayan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, yaitu mampu memberikan masukan dan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu Administrasi Negara, khususnya terkait topik implementasi kebijakan publik supaya aparatur pelaksana kebijakan dapat menjaga konsistensi implementasi program di Provinsi Lampung
2. Manfaat Praktis, yaitu memberikan masukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan Perbankan untuk dapat mengimplementasikan kebijakan program secara efektif dan tepat guna dengan selalu menjaga konsistensi sebagai aparatur pelaksana kebijakan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Islamy dalam Sulistio (2012:3) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan oleh institusi publik (instansi atau badan-badan pemerintah) bersama-sama dengan aktor-aktor elit politik dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik demi kepentingan seluruh masyarakat. Ruang lingkup studi kebijakan publik adalah :

- a) Penyusunan agenda kebijakan
- b) Formulasi kebijakan
- c) Adopsi kebijakan
- d) Implementasi kebijakan
- e) Evaluasi kebijakan

f) Anjuran kebijakan dan rekomendasi kebijakan

Eyestone dalam Winarno, (2012:19) menyatakan bahwa Secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Ada beberapa ahli yang mengutarakan pendapatnya tentang kebijakan publik. Sehingga kebijakan publik memiliki ragam definisi. Friedrich dalam Winarno (2012:20) mendefinisikan kebijakan publik sebagai perangkat tindakan yang dilakukan pemerintah dengan mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan adanya hambatan-hambatan sehingga mencapai sasaran dan tujuan yang telah diinginkan.

Sedangkan Anderson dalam Winarno (2012:19) merumuskan kebijakan publik sebagai kegiatan-kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatasi satu masalah. Pengertian kebijakan publik dikemukakan oleh Anderson dalam Winarno (2012:22) yaitu merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Berdasarkan pengertian–pengertian dari kebijakan publik di atas maka penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu perilaku para aktor yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu dalam mengatasi suatu

masalah yang ada di suatu dengan negara. Dengan begitu, dari suatu perilaku para aktor maka dihasilkanlah suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah yang ditujukan untuk keseluruhan kehidupan masyarakat.

2. Ciri-ciri umum Kebijakan

Anderson dalam Abidin (2012:22-23) mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Public Policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chance behavior.* Setiap kebijakan mesti ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Bila tidak ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan.
- b. *Public policy consists of courses of action—rather than separate, discrete decision or actions—performed by government officials.* Maksudnya, suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
- c. *Policy is what government do—not what they say will do or what they intend to do.* Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah.
- d. *Public policy may be either negative or positive.* Kebijakan dapat berbentuk *negative* atau melarang dan juga dapat berupa pengarah untuk melaksanakan atau menganjurkan.
- e. *Public policy is based on law and is authoritative.* Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi.

B. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:25) tahap-tahap kebijakan publik meliputi :

1. Penyusunan Agenda

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:30) penyusunan agenda adalah Pejabat-pejabat yang duduk dalam pemerintahan akan menempatkan masalah-masalah yang akan dijadikan dalam agenda publik. Sebelum menetapkan masalah-masalah yang akan masuk dalam agenda publik, masalah-masalah yang ada di publik akan berkompetisi terlebih dahulu sehingga akhirnya nanti akan ada beberapa masalah yang masuk dalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap agenda ini ada masalah yang tidak disentuh sama sekali, ada pula masalah yang dijadikan fokus dalam agenda serta terdapat pula masalah yang akan ditunda untuk waktu yang lama karena alasan-alasan tertentu.

Menurut William Dunn dalam Winarno (2012:30) isu kebijakan merupakan hasil dari perdebatan tentang definisi, eksplanasi dan evaluasi masalah. Isu kebijakan tersebut akan menjadi embrio awal bagi munculnya masalah-masalah publik dan apabila masalah tersebut mendapat perhatian yang memadai, maka akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Agar isu publik mendapat tempat dalam agenda kebijakan, maka isu publik harus dikelola dengan baik. Pengelolaan isu (manajemen isu kebijakan) sangat penting, mengingat begitu banyaknya isu kebijakan yang dimunculkan, baik oleh rakyat, kelompok penekan, partai politik, pemerintah maupun anggota legislatif sendiri. Isu Kebijakan dapat didorong menjadi Agenda Kebijakan, jika memenuhi syarat sebagai berikut Wahab dalam Sulistio (2012:15).

- a. Isu tersebut telah mencapai titik kritis tertentu, sehingga ia praktis tidak bisa diabaikan begitu saja; atau ia telah dipersepsikan sebagai suatu ancaman serius yang jika tidak segera diatasi justru akan menimbulkan luapan krisis baru yang jauh lebih hebat di masa datang.
- b. Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularistik tertentu (mendapat perhatian masyarakat luas secara khusus) dan berdampak dramatis. Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak, bahkan umat manusia pada umumnya dan mendapat dukungan berupa liputan media massa yang amat luas.
- c. Isu tersebut mampu menjangkau dampak yang amat luas.
- d. Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat.
- e. Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang *fashionable* (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).

Sedangkan metode atau teknik yang dapat digunakan dalam fase perumusan masalah, menurut Dunn (2003:247-278) adalah sebagai berikut :

- a. Analisis Batasan, yaitu suatu metode untuk meyakinkan tingkat kelengkapan dari serangkaian referensi masalah (meta problem) melalui proses tiga langkah dari pencarian bola salju, pencarian referensi masalah dan estimasi batasan.
- b. Analisis Klasifikasi, yaitu teknik atau metode guna memperjelas konsep-konsep yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengklarifikasi kondisi permasalahan.
- c. Analisis Hierarkis, yaitu suatu metode untuk mengidentifikasi sebab-sebab yang mungkin dari suatu situasi masalah. Analisis ini dapat membantu para analis kebijakan dalam mengidentifikasikan tiga macam sebab, yakni sebab

yang mungkin (*possible causes*), sebab yang masuk akal (*plausible causes*) dan sebab yang ditindaklanjuti (*actionable causes*).

- d. Sinektika, yaitu metode yang diciptakan untuk mengenali masalah-masalah yang bersifat analog. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa pemahaman terhadap hubungan yang identik atau mirip diantara berbagai masalah akan mengakibatkan kemampuan analisis kebijakan untuk memecahkan masalah.
- e. *Brainstorming*, yaitu metode untuk menghasilkan ide-ide, tujuan-tujuan jangka pendek dan strategi-strategi yang membantu untuk mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan kondisi-kondisi permasalahan. Metode ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan sejumlah perkiraan-perkiraan mengenai solusi yang potensial bagi masalah-masalah.
- f. Analisis Perspektif Berganda, yaitu metode untuk memperoleh pandangan yang lebih banyak mengenai masalah dan peluang pemecahannya dengan secara sistematis menerapkan perspektif personal, organisasional dan teknikal terhadap situasi masalah.
- g. Analisis Asumsi, yaitu metode yang bertujuan mensintesis secara kreatif asumsi-asumsi yang saling bertentangan mengenai masalah kebijakan.
- h. Pemetaan Argumentasi, yaitu teknik yang memetakan beberapa argument kebijakan seperti otoritatif, *statistical*, klasifikasional, analisentris, kausal, intuitif, pragmatis dan kritik nilai yang didasarkan pada asumsi yang benar-benar berbeda.

Penyusunan agenda kebijakan seyogyanya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan *stakeholder*. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan *stakeholder*.

2. Formulasi Kebijakan

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:31) tahap formulasi kebijakan adalah Masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan kemudian akan dibahas oleh para pembuat kebijakan, masalah tersebut kemudian akan dicari bentuk-bentuk cara untuk penyelesaiannya. Pemecahan masalah tersebut berasal dari alternatif-alternatif (*policy alternative*) yang ada. Penyeleksian alternatif-alternatif tersebut sama halnya dengan menetapkan masalah yang ditetapkan sebagai agenda publik yaitu beberapa alternatif bersaing untuk bisa diambil dan ditetapkan sebagai penyelesaian dari permasalahan. Pada tahapan formulasi ini para aktor memainkan perannya untuk mengusulkan pemecahan masalah yang terbaik.

3. Adopsi/ Rekomendasi Kebijakan

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:31) tahap adopsi kebijakan adalah Artinya, alternatif yang dipilih untuk disarankan telah dihitung nilai lebihnya dibandingkan dengan berbagai alternatif lain yang mungkin dapat dilakukan. Perbandingan antara nilai-nilai yang diperhitungkan itu meliputi efisiensi, efektivitas, kepatutan, adil dan lain-lain, baik yang berkenaan dengan *inputs*, *outputs* maupun dengan *outcomes*.

Menurut Dunn dalam Abidin (2004:170-171) empat macam karakteristik dari rekomendasi kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. *Action Focus*, maksudnya adalah bahwa titik berat dari rekomendasi terletak pada tindakan yang disarankan. Rekomendasi tidak hanya tentang apa yang akan terjadi di masa depan (*prediction*) dan apa yang sebaiknya terjadi

(*valuable evaluation*), tetapi juga tentang aksi yang diperlukan untuk membuat kondisi itu terjadi.

- b. *Future oriented* atau *prospective*. Rekomendasi perlu dapat menjelaskan tentang keadaan sebelum adanya aksi dan keadaan di masa depan sesudah adanya aksi.
- c. *Fact-value interdependence*. Dalam rekomendasi terdapat saling keterkaitan antara fakta dan nilai. Rekomendasi berkaitan sekaligus dengan fakta dan nilai.
- d. *Value-duality*. Maksudnya, banyak aspek pada umumnya mempunyai nilai kembar, yakni nilai intrinsik berupa nilai akhir yang menjadi tujuan dari kebijakan, dan nilai ekstrinsik, yaitu sebagai sasaran antara atau sebagai jalan untuk mencapai tujuan atau sasaran akhir, dan nilainya tergantung pada kemanfaatannya sebagai alat untuk mencapai tujuan lain lebih lanjut (*as a means to achieve other values*). Adapun langkah-langkah dalam yang perlu diperhatikan dalam membuat rekomendasi kebijakan dalam Abidin, (2004:171-182) yaitu sebagai berikut:
 - 1) Merumuskan pertanyaan secara tepat.
 - 2) Tentukan secara khusus kepada siapa saran hendak diajukan.
 - 3) Identifikasi masalah yang ingin dipecahkan.
 - 4) Memastikan tujuan/sasaran yang ingin dicapai.
 - 5) Menentukan asumsi yang diperlukan.
 - 6) Mengidentifikasi para pelaku dan piha-pihak yang terkait.
 - 7) Mengidentifikasi strategit-strategi alternatif untuk pemecahan masalah.

- 8) Menentukan kriteria dan menganalisis strategi-strategi alternatif atas dasarkriteria itu.
- 9) Uraian dan pilihan.

4. Implementasi/ Pelaksanaan Kebijakan

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:31-32) tahap implementasi kebijakan adalah Suatu program kebijakan hanya akan menjadi dokumen serta arsip-arsip yang tertata rapi jika kebijakan tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah sampai pada tingkat bawah sehingga diharapkan kebijakan yang sudah terbentuk tidak sia-sia dan berjalan dengan baik. Pada tahap implementasi berbagai kepentingan akan bersaing yang pada nantinya akan bermunculan para pelaksana yang mendukung kebijakan tersebut dan para pelaksana yang menolak dengan kebijakan tersebut.

Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang paling penting dari keseluruhan proses kebijakan, dan bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan itu sendiri. Menurut Abidin (2004:206) tidak semua kebijakan berhasil dilakukan secara sempurna, karena pelaksanaan kebijakan pada umumnya memang lebih sukar dari sekedar merumuskannya. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan menyangkut kondisi riil yang sering berubah dan sukar diprediksikan. Selain itu, dalam proses perumusan kebijakan biasanya terdapat asumsi, generalisasi dan simplifikasi yang di dalam pelaksanaannya tidak mungkin dilakukan. Akibatnya, dalam kenyataan terjadi "*implementation gap*", yakni kesenjangan atau perbedaan antara apa yang

dirumuskan dengan apa yang dilaksanakan. timbulnya kesenjangan-kesenjangan tersebut antara lain disebabkan oleh:

- a. Substansi kebijakan tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat sesungguhnya tidak membutuhkan suatu kebijakan tertentu, namun para pengambil kebijakan (*decision maker*) justru memutuskan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
- b. Kebijakan tidak menguntungkan publik. Suatu kebijakan publik akan ditolak kehadirannya di tengah-tengah masyarakat sebab adanya kebijakan itu tidak memberikan keuntungan sedikitpun yang dapat mereka rasakan. Kecuali hanya menambah beban publik (*public burden*) saja.
- c. Tidak layak. Kebijakan publik akan gagal diimplementasikan di lapangan, bilamana kebijakan tersebut tidak layak, baik dari sisi waktu, biaya maupun kebutuhan.

5. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Lester dan Stewart dalam Winarno (2012:192) Proses evaluasi kebijakan dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi kegagalan dalam kebijakan publik untuk meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Sedangkan menurut Jones dalam Winarno (2012:192) mendefinisikan secara singkat proses evaluasi sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat kebijakan.

Secara umum, menurut Anderson dalam Winarno (2012:193) evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

C. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2012:134) Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan, dimana kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu. Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Jadi Implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan

dalam keputusan dan memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan serta memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama sehingga dapat tercapainya sebuah kebijakan yang memberikan hasil terhadap tindakan-tindakan individu publik dan swasta.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:135-136) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencangkup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, yang perlu ditekankan di dalam implementasi kebijakan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran di tetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Adapun menurut Mazmanian & Paul Sabatier dalam Wahab (2004:68) *Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions* (implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya

dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan).” Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.

Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata; baik yang dikehendaki atau yang tidak dari *output* tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan. Secara lebih konkrit Mazmanian & Sabatier menyatakan bahwa fokus perhatian dalam implementasi yaitu memahami apa yg senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku, diantaranya adalah kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan yang mencakup usaha mengadministrasikan maupun usaha menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012:134) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi merujuk pada sebuah kegiatan yang

mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan seperti:

- a. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan uang.
- b. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program.
- c. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi bebankerja. Akhirnya, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.

Grindle dalam Winarno (2012:135) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery*

system,” di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik diartikan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Program-program tindakan itu bisa dipilah-pilah ke dalam proyek-proyek yang spesifik untuk dikelola. Maksud dari program-program tindakan dan proyek-proyek individu adalah untuk mendatangkan suatu perubahan dalam lingkaran kebijakan, suatu perubahan yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program.

Berdasarkan konsep-konsep tentang implementasi kebijakan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan dari suatu proses kebijakan yang biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dari berbagai aktor. Sehingga tercapailah suatu kebijakan yang memberikan hasil yang praktis terhadap sesama.

2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2012:146) Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, akan muncul pada saat pengimplementasiannya. Implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Nugroho mengatakan dalam bukunya (2008:436) bahwa perumusan kebijakan (rencana) hanya memiliki porsi 20% keberhasilan, sedangkan implementasi adalah 60%, sedangkan sisanya 20% adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Itu artinya, implementasi adalah proses yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utamanya adalah konsistensi implementasi.

Agar penyajian implementasi suatu kebijakan lebih baik, perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Maka dari itu, diperlukan suatu model implementasi kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Ada begitu banyak model-model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh pakar sosial dan beberapa model tersebut dikembangkan oleh beberapa pakar sosial sebagai alat untuk mengkaji apa-apa saja bentuk (jenis) implementasi kebijakan, apa saja variable-variabel serta syarat-syarat agar implementasi kebijakan tersebut bisa menjadi berhasil secara sempurna.

Menurut Suharno (2013:176-177) beberapa model kebijakan yang dikembangkan oleh pakar sosial tersebut adalah:

a. Model Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:176-177) model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu :

1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan- hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil dan pada setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan yang jelas dan terukur. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka tujuannya dapat terwujudkan.

Jika di dalam sebuah kebijakan standar dan sasarannya tidak jelas, maka tidak akan bisa terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalahpahaman serta konflik di antara para agen implementasi. Menurut van Meter dan van Horn dalam Suharno (2013:176) identifikasi indikator indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisa implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan

merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

2) Sumber daya

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2012:176) selain ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencangkup dana atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:176) keberhasilan proses implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Selain sumber daya manusia. Menurut van Meter dan van Horn dalam Suharno (2013:177) sumber-sumber daya lainnya yang perlu diperhitungkan juga adalah sumber daya finansial. Karena mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui

anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan politik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

3) Hubungan antar organisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:177) di dalam program-program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan maka perlu adanya hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu hal yang sangat utama dan penting dari sebuah organisasi demi terealisasikannya program-program organisasi tersebut dengan tujuan serta sasarannya. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.

4) Karakteristik agen pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:177) dalam suatu implementasi kebijakan, untuk mencapai suatu keberhasilan yang maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Hal-hal tersebutlah yang akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

5) Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Menurut Van Meter Van Horn Suharno (2013:177) Hal ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yaitu mendukung atau menolak, serta sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan dalam

6) Disposisi implementor

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:177) dalam implementasi kebijakan, sikap atau disposisi implementor.

b. Model George Edward III

Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan nama *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Menurut Edwards dalam Winarno (2012:177), studi implementasi adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu: apa

yang menjadi pra syarat bagi implementasi kebijakan serta apa yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Untuk menjawab dua pertanyaan pokok tersebut, maka Edward dalam Winarno (2012:156-170) mengusulkan empat variabel yang menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan. Empat variabel tersebut yaitu:

- 1) Komunikasi.
- 2) Sumber daya

c. Model Mazmanian dan Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabastier dalam Suharno (2013:173) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan. Karakteristik masalah (*tractability of the problems*) meliputi beberapa faktor sebagai berikut Mazmanian dan Sabatier dalam Suharno (2013:173-174):

- 1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
- 2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Artinya, suatu program akan relatif mudah untuk diimplementasikan pada kelompok sasaran yang relatif homogen. Sebaliknya, untuk kelompok sasaran yang relatif heterogen, implementasi kebijakan juga akan relatif sulit. Dengan kata lain, semakin heterogen sebuah kelompok sasaran maka tingkat kesulitan implementasi kebijakan juga relatif meningkat.
- 3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi.

Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.

- 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan lebih mudah diimplementasikan dari pada sebuah program yang ditujukan untuk merubah perilaku masyarakat. Karakteristik kebijakan (*ability of statue to structure implementation*) mencakup beberapa hal Mazmanian dan Sabatier dalam Suharno (2013:174-175):

- a) Kejelasan isi kebijakan.
- b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
- c) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut.
- d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Setiap institusi yang terkait dengan implementasi kebijakan harus melakukan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan..
- g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Sedangkan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), meliputi beberapa faktor yaitu Mazmanian dan Sabatier dalam Suharno (2013:175-176):

- (a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
- (b) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.
- (c) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*).

d. Model Grindle

Dikemukakan oleh Wibawa dalam Nugroho (2008:445) model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakannya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut ini:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan.
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan.
- 5) (Siapa) pelaksana program.
- 6) Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu, lingkungan atau konteks implementasinya dalam Suharno (2013:173) adalah:

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- 2) Karakteristik lembaga penguasa atau institusi dan rejim yang berkuasa.
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

e. Model Weimer dan Vinin

Weimer dan Vining dalam Suharno (2013:178) memiliki pandangan lain terhadap sebuah proses implementasi kebijakan. Menurut mereka ada tiga kelompok besar variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

- 1) Logika kebijakan.
- 2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan.
- 3) Kemampuan implementor kebijakan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Van Metter Van Horn karena peneliti ingin melihat bagaimana respon yang diberikan oleh seluruh implementor dari Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*). Dengan begitu peneliti akan mengetahui sejauh mana mereka antusias untuk menjalankan program tersebut ataukah tidak. Adapun alasan peneliti menjadikan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn sebagai fokus penelitian adalah karena variabel-variabel yang terdapat dalam teori tersebut cocok jika digunakan sebagai titik fokus penelitian, sebab variabel-variabel yang terdapat dalam Model Van Meter dan Van Horn secara keseluruhan mempengaruhi keberhasilan program ini. Selanjutnya pada teori van Meter dan van Horn ini juga menekankan pada kinerja atau partisipasi implementor dalam pelaksanaan kebijakan, kemudian dalam teori ini juga memiliki enam variabel yang membentuk suatu ikatan antara kebijakan dan pencapaian. Sehingga jika dilihat secara keseluruhan pada teori ini bukan hanya menekankan pada implementornya saja atau masyarakat sebagai penerima pelayanan saja, namun keduanya yang terlibat sebagai aktor kebijakan akan dilihat sehingga dapat dianalisis apa yang menyebabkan sebuah kendala dalam suatu penelitian.

D. Pengertian Program Jaring

1. Definisi & Tujuan Program

- a. Program JARING 2015 merupakan program inisiatif jangka pendek OJK (Regulator) dan KKP (Pemerintah) untuk menjangkau sektor kelautan dan perikanan, dengan cara bersinergi dengan Pelaku Jasa Keuangan (PJK) termasuk asosiasi, dengan sasaran akselerasi pertumbuhan di sektor kelautan dan perikanan melalui pembuatan *Guideline* kepada sektor jasa keuangan dari hulu sampai hilir (*value chain*) serta peran serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. JARING merupakan akronim dari Jangkau, Sinergi dan *Guideline*.
- b. Program JARING 2015 bertujuan menjawab kebutuhan *stakeholders* terhadap informasi tentang database Kelautan dan Perikanan, skim pembiayaan, pemetaan risiko bisnis dan dukungan regulasi dari otoritas terkait.

2. Target Dan Sasaran Program

Target utama program JARING adalah peningkatan pembiayaan di sektor Kelautan dan Perikanan yang terus bertumbuh serta mendorong perluasan akses masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

- a. Sasaran Jangka Pendek Program JARING adalah menyediakan infrastruktur kepada sektor jasa keuangan (SJK) dalam meningkatkan pembiayaan kepada sektor kelautan dan perikanan sebesar lebih dari 50% pada tahun 2015, melalui antara lain:

- 1) Penyediaan data dan informasi yang komprehensif mengenai sektor Kelautan dan Perikanan kepada SJK yang dituangkan dalam bentuk buku berisikan data dan informasi potensi bisnis dan peta risiko, *value chain* bisnis dan skim pembiayaan kepada sektor kelautan dan perikanan. Buku dilengkapi dengan uraian dukungan regulasi dari instansi terkait. Buku tersebut selanjutnya akan disebut Buku JARING.
 - 2) Ketersediaan regulasi yang kondusif bagi pembiayaan SJK kepada sektor Kelautan dan Perikanan.
 - 3) Sosialisasi Program JARING melalui kegiatan *Kick-Off* Program JARING dan serangkaian sosialisasi yang dilaksanakan OJK.
- b. Sasaran Jangka Menengah–Panjang mulai tahun 2016 adalah mendorong peningkatan pembiayaan SJK kepada sektor Kelautan dan Perikanan secara bertahap melalui:
- 1) Perluasan pembiayaan ke seluruh sektor maritim, yang mencakup jasa kelautan, transportasi laut, bangunan kelautan, industri maritim, wisata bahari, dan energi dan sumber daya mineral.
 - 2) Perluasan lembaga jasa keuangan sebagai partner program JARING.
 - 3) Peningkatan kemampuan SDM Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), nelayan, dan SJK melalui pelatihan bersertifikat yang diselenggarakan oleh OJK Institute.
 - 4) Program edukasi dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat, khususnya di sektor kelautan dan perikanan, terhadap produk dan jasa dari SJK.

3. Manfaat Program

Manfaat Program JARING dalam rangka mendukung kemandirian dan kedaulatan sektor kemaritiman meliputi:

- a. Peningkatan inklusi keuangan, yaitu peningkatan akses masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah terhadap sistem atau industri keuangan;
- b. Stimulasi SJK untuk memberikan kredit melalui pendalaman pengetahuan SJK terhadap Sektor KP yang selama ini dianggap memiliki risiko tinggi sehingga pembiayaan kepada sektor ini masih belum tinggi;
- c. Peningkatan kesejahteraan nelayan (peningkatan *income* perkapita);
- d. Peningkatan jumlah lapangan kerja dan mengurangi pengangguran
- e. Peningkatan cadangan devisa.

E. Pemberdayaan Masyarakat

1. Kesejahteraan untuk semua

Menurut Chamber dalam Mardikanto, dkk (2015:25) Masalah kemiskinan, nampaknya sudah menjadi gejala umum di seluruh dunia. Karena itulah, pemberantasan kemiskinan dimasukkan dalam agenda pertama dari agenda *Millenium Development Goals* (MDG's). Bagi Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan dewasa ini menjadi sangat penting karena Bank Dunia telah menyimpulkan bahwa kemiskinan di negara kita bukan sekadar 10-20% penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut (*extreme poverty*), tetapi ada kenyataan lain yang membuktikan bahwa kurang lebih tiga per lima atau 60% penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan karena itu, mengacu pada

paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-contered, participatory, empowering, and sustainable*” maka upaya pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan.

Istilah “pemberdayaan masyarakat” sebagai terjemahan dari kata “*empowerment*” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Inodnesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” (*poverty alleviation*) sejak digulirkannya Program Inpres No. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan merupakan “saudara kembar” yang selalu menjadi topik dan kata-kunci dari upaya pembangunan.

Terkait dengan pengertian pemberdayaan, Dharmawan dalam Mardikanto, dkk (2015:25) yang mengemukakan bahwa pemberdayaan sebagai berikut *a process in which increasingly more members of a given area or environment make and implement socially responsible decisions, where the probable consequence of which is an increase in the life chances of some people without a decrease (without deteriorating) in the life chances of others.*

Dalam hubungan ini, Robbins, Chatterjee, & Canda dalam Mardikanto, dkk (2015:25) secara singkat menyatakan sebgai berikut *empowerment process by which individuals and group gain power, access to resources and control over their own lives. In doing so, they gain the ability to achieve their highest personal and collective aspirations and goals.*

Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Menurut Sumodiningrat dalam Mardikanto, dkk (2015:25) Keberdayaan masyarakat sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan

Menurut Swift dan Levin dalam Mardikanto, dkk (2015:25) Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk:

- a. Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan
- b. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial

Istilah pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktiivitas sosialnya, dll.

Karena itu, World Bank dalam Mardikanto, dkk (2015:25) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau meyuarkan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, dan

tindakan, dan lain-lain) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi bernegosiasi mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya.

Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan masyarakat mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti:

- a. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan
- b. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan)
- c. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
- d. Terjaminnya keamanan
- e. Terjaminnya Hak Asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran

Berkaitan dengan kekuasaan, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk mengembangkan kepribadian diri dengan cara menggali potensi yang dimiliki dan menumbuhkan kepercayaan diri yang kuat.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh kemampuan untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi hambatan pribadi dan hambatan sosial dalam pengambilan tindakan.

3. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat dalam Ambar Teguh (2004: 82) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagaimana disampaikan di muka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap.

Menurut Sumodiningrat dalam Ambar Teguh (2004: 83) Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

- a. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, Tipe penelitian ini menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian dengan apa yang sebenarnya terjadi dan apa adanya. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Secara definisi, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Sedangkan esensi dari penelitian kualitatif sendiri ialah memahami yang diartikan sebagai memahami apa yang dirasakan orang lain, memahami pola pikir dan sudut pandang orang lain, memahami sebuah fenomena (*central phenomenon*) berdasarkan sudut pandang sekelompok orang atau komunitas tertentu dalam latar alamiah. Menurut Moleong (2011:3) metode kualitatif didefinisikan untuk memahami tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Creswell dalam Herdiansyah (2010:8) menyebutkan bahwa *Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, report detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting.*

Maksudnya adalah bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apa pun dari peneliti. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, peneliti dapat melihat fenomena-fenomena yang ada, yakni tentang implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) di Provinsi Lampung dan diharapkan pula peneliti dapat mengamati program tersebut dan menuangkannya ke dalam hasil penelitian.

B. Fokus Penelitian

Masalah pada penelitian bertumpu pada sebuah fokus. Fokus penelitian merupakan batas masalah yang ada di dalam penelitian kualitatif, dimana fokus ini berisikan tentang pokok masalah yang sifatnya umum. Adanya fokus di dalam penelitian dengan metode kualitatif sangatlah penting, dikarenakan dengan adanya fokus penelitian ini kita dapat membatasi apa saja yang akan diteliti dan dapat mengarahkan pelaksanaan penelitian. Tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan.

Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*) di Provinsi Lampung adalah:

Penelitian ini difokuskan pada Implementasi kebijakan dengan variabel-variabel yang terdapat dalam Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Suharno (2013:179) yang meliputi :

a. Standar dan sasaran kebijakan

Kinerja dari implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*) dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukurran dan tujuan Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*).

b. Sumberdaya

- 1) Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*).
- 2) Sumber Daya Finansial yaitu dana yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan atau program.

c. Hubungan antar organisasi

Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu hal yang sangat utama dan penting dari sebuah organisasi demi terealisasikannya program-program organisasi tersebut dengan tujuan serta sasarannya. Dalam menjalankan program ini, Otoritas Jasa Keuangan tidak menjalankan program ini sendiri. Namun ada dinas yang bermitra dengan lembaga ini yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan dan Perbankan (BRI). Maka, peneliti juga melihat sejauh mana mereka bisa berkoordinasi dan bekerjasama dalam melaksanakan program ini sebaik mungkin, sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah berhasil

diterapkan. Selain itu, peneliti juga ingin melihat apa saja yang menjadi hambatan dari keduanya dalam bekerjasama, sehingga hal tersebut bisa menghambat jalannya program.

d. Karakteristik agen pelaksana

- 1) Struktur birokrasi
- 2) Norma-norma

e. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Hal ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yaitu mendukung atau menolak, serta sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Maka, peneliti ingin melihat sejauh mana kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi dari para peserta nelayan aktif yang mengikuti Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) bisa mempengaruhi mereka dalam mengikuti program tersebut.

f. Disposisi implementor

Dalam implementasi kebijakan, sikap atau disposisi implementor dibedakan menjadi tiga hal, yaitu :

- 1) Respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik;
 - 2) Kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan;
- dan

- 3) Intens disposisi implementor, yakni prefensi nilai yang dimiliki tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara *purposive* atau dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2014:218) *purposive* merupakan lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di dalam lingkup wilayah Provinsi Lampung, khususnya di Otoritas Jasa Keuangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Perbankan (BRI) serta masyarakat nelayan.

Alasan peneliti menjadikan Provinsi Lampung sebagai tempat lokasi penelitian adalah karena Provinsi Lampung yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dalam bidang Kelautan dan Perikanan. Provinsi Lampung sendiri merupakan penghasil udang terbaik dengan kuantitas terbaik, dengan wilayah laut Provinsi Lampung yang memiliki $\frac{3}{4}$ sumber kelautan dan Perikanan yang sangat banyak dan banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan khususnya di Provinsi Lampung.

Selain di Provinsi Lampung lokasi peneliti diantara lainnya di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Perbankan (BRI) Provinsi Lampung yang merupakan yang pelaksana di bidang Sektor Jasa keuangan, Kelautan dan Perikanan, dan nelayan. Sehingga diharapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Perbankan ini dapat menjadi rujukan yang tepat bagi peneliti untuk melakukan penelitian.

D. Informan Penelitian

Menurut Sanafiah Faisal dalam Sugiyono (2014:221) penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Oleh karena itu, orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Mereka menguasai tentang pelaksanaan teknis Program Jaring (jangkau, sinergi, *Guideline*) di Provinsi Lampung
- b. Mereka ikut terlibat langsung ke lapangan dalam menerapkan Program Jaring (jangkau, sinergi, *Guideline*) di Provinsi Lampung
- c. Mereka mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai.
- d. Mereka berkenan untuk menyampaikan keadaan yang sebenarnya dan tidak cenderung berasal dari gagasannya sendiri.

Adapun informan dalam penelitian yang diperoleh dari kunjungan lapangan ke lokasi penelitian oleh peneliti di Kantor Otoritas Jasa Keuangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dipilih secara *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu merupakan metode penetapan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui tentang Program Program Jaring (jangkau, sinergi, *Guideline*) di Provinsi Lampung sehingga mereka akan memberikan informasi secara tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan penjelasan tersebut, maka pihak-pihak yang dijadikan informan oleh peneliti diantaranya yaitu dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Daftar Informan

No.	Jabatan Informan	Nama Informan	Tanggal Wawancara
1.	Deputi Komisioner Pengawasan IKNB 1	Ibu Iindah	14 Oktober 2016
2.	Ka. Bagian Tangkap	Ibu Rita	12 September 2016
3.	Perbankan (BRI)	Bapak Redy Apridika	23 Oktober 2016
4.	Masyarakat yang menerima	1. Yazid Muzaki 2. Jalaluddin 3. Zainal 4. Ahmed 5. Raihan 6. Sumito 7. Prayetno 8. Rozak 9. Jumi 10. Sumiati	1. 10 Oktober 2016 2. 10 Oktober 2016 3. 30 Januari 2017 4. 30 Januari 2017 5. 30 Januari 2017 6. 30 Januari 2017 7. 30 Januari 2017 8. 30 Januari 2017 9. 30 Januari 2017 10. 30 Januari 2017

Sumber: diolah Peneliti Tahun 2016

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung. Adapun data primer yang didapat dalam penelitian, yaitu hasil wawancara terhadap orang-orang yang berada di dalam Dinas Kelautan dan Perikanan Ka. Bagian Tangkap dan Otoritas Jasa Keuangan Deputi Komisioner Pengawasan IKNB 1

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat melalui dokumentasi peneliti terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian, serta data yang juga didapat dari berbagai macam media, elektronik maupun cetak. Adapun data sekunder yang diperoleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya berupa, literatur, dokumentasi, skripsi, buku-buku, dan lain- lain yang ada

hubungan dengan implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergis, Dan *Guideline*) di Provinsi Lampung.

Tabel 5. Data Sekunder

No	Jenis Data Sekunder	Data Sekunder
1	Buku-buku	Buku Sosialisasi Akses Pendanaan Nelayan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Bank di PPI, dan Buku Pedoman Program Jaring (Jangkau, Sinerggi, dan <i>Guideline</i>)
2.	Dokumentasi	1. Foto-foto Sosialisasi 2. Foto-foto Sumber Daya Manusia (Teller Bank BRI Provinsi Lampung) 3. Foto-foto Teller Bank BRI Provinsi Lampung menjelaskan syarat-syarat Peminjaman modal usaha di Bank BRI Provinsi Lampung 4. Gambar Struktur Agen Pelaksana 5. Gambar Model Hubungan Antar Organisasi
3.	Skripsi	1. Merita Rahma 2. Aliza Puspita
4	Data-data	f. Data Rekapitulasi daftar Kub Perikanan Tangkap Provinsi Lampung TA.2015 g. Data Bank Partner dan IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) sampai dengan september 2015 h. Data Jumlah Masyarakat Nelayan di Provinsi Lampung i. Data Fungsi Bank Menyalurkan Dana Ke Masyarakat Nelayan j. Data Jumlah kartu Nelayan Di Provinsi Lampung k. Data Jumlah Rumah Tangga Perikanan Di Provinsi lampung
5	Website	1. Web Badan pusat statistic. 2012 2. http://seputarlampung.co.id/program-jaring-untuk-pengembangan-kelautan-dan-perikanan/. Diakses 5 Oktober 2015 pukul 16.00 wib 3. Dkplampung.hol.es/sejaraj/dinas-Kelautan-dan-Perikanan-provinsi-lampung.diaksestanggal22Oktober2016) 4. http://dhizzztie.wordpress.com/2011/05/09/kehidupan-masyarakat-pesisir-lampung.diakses12Oktober2016) 5. www.ojk.go.id/kanal/perbankan/tentang-perbankan/pages/tugas.aspx.diaksestanggal12Oktober2016) 6. Pesisirlampung.blogspot.co.id/2011/05/potensi-sumber-daya-alam-pesisir.html?m=1. diakses tanggal 12 Oktober 2016)

Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2016

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Nasution dalam Sugiyono (2014:226) menyatakan bahwa metode observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya peneliti telah melakukan observasi terkait Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Provinsi Lampung di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, BRI KCP Lampung Selatan, Masyarakat nelayan yang ada di Lempasing dan Kalianda. Menurut Sanafiah Faisal dalam Sugioyono (2014:226) observasi terbagi menjadi dua berdasarkan peran peneliti yaitu observasi partisipan (*participant observation*) dan non-partisipan (*non-partisipant observation*)

Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Sedangkan observasi non-partisipan merupakan observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian. Dalam metode ini, peneliti

menggunakan observasi jenis non-partisipan, karena peneliti hanya turun langsung ke lapangan mengamati dan melihat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, khususnya mengenai program Program Jaring (Jangkau, Sinergis, Dan *Guideline*) di Provinsi Lampung (Study Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung) yang sedang diteliti.

Alasan peneliti menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini adalah untuk melihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan, sekaligus untuk *cross check* segala sesuatu yang disampaikan oleh informan. Selanjutnya peneliti juga bisa menganalisis secara langsung apa yang tidak disampaikan oleh informan dalam penelitian.

2. Metode Wawancara

Esterbeg dalam Sugiyono (2014:231) menyatakan bahwa interview merupakan pertemuan dua orang untuk dapat bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Sedangkan menurut Stainback dalam Sugiyono (2014:232) menyatakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Melalui penelitian ini, peneliti mewawancarai informan-informan yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan (BRI) dan Masyarakat Nelayan yang terkait dalam masalah

penelitian untuk mendapatkan informasi yang ingin peneliti peroleh dari dinas tersebut yang berkenaan dengan penelitian.

3. Metode Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014: 234) menyatakan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dalam kata lain adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa undang-undang, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan kebijakan, dan foto.

Metode ini menjelaskan bahwa peneliti dapat mengumpulkan data dengan cara melihat serta mempelajari data-data berupa dokumentasi dari organisasi terkait. Dalam metode ini, peneliti memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian melalui berbagai dokumentasi yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Otoritas Jasa Keuangan berupa dokumen-dokumen berisikan data-data yang berhubungan dengan penelitian, surat-surat resmi, serta buku-buku panduan yang berkenaan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terus menerus sampai data itu jenuh. Bodgan dalam Sugiyono (2014:244) menyatakan bahwa *data analysis is the process of systematically searching and*

arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Menurut Sugiyono (2014:244) analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. aktifitas dalam analisis data yaitu meliputi :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hal ini dipilih karena melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi peneliti dapat melihat secara lebih lengkap dan terperinci terkait inovasi dilakukan mulai dari perencanaan dan pelaksanaannya

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan sangat banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Sehingga segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan

dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi dalam Sugiyono (2014:249).

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:249) menyatakan *the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*.

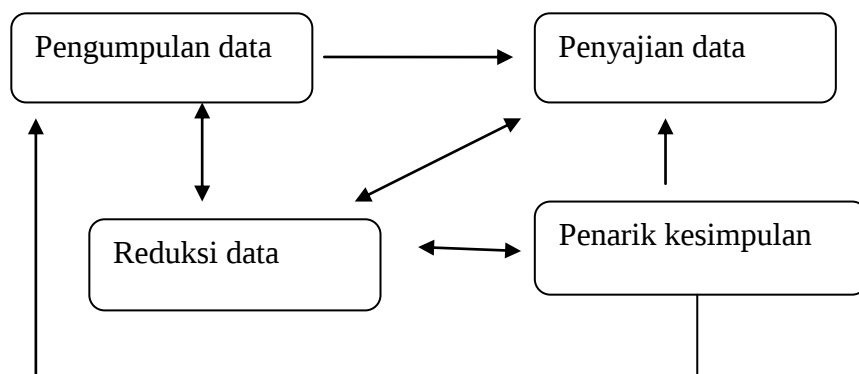
Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Maka, dengan *mendisplaykan* data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Berdasarkan penelitian yang diteliti peneliti menulis uraian singkat berupa point terpenting (inti) bisa dimulai dari fenomena permasalahan dan tindakan

4. *Conclusion Drawing (verivication)*

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:252) langkah selanjutnya dalam *analisis* data kualitatif adalah penarikan kesimpulan.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif kemungkinan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal atau kemungkinan juga tidak, karena seperti yang telah diketahui bahwasannya masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Berikut ini bagan penjelasan analisis data model interaktif yang digunakan pada penelitian ini:



Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif.

Sumber: Miles dan Huberman dikutip oleh Moleong (2011).

H. Teknik Keabsahan Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sehingga, data yang *valid* merupakan data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi :

1. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Derajat kepercayaan menunjukkan bahwa hasil-hasil penemuan dapat dibuktikan dengan cara peneliti melakukan pengecekan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari elemen yang berbeda. Untuk menguji *credibility* untuk hasil penelitian peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa tehnik pemeriksaan, yaitu:

b. Triangulasi

Menurut Moleong (2011:330) triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainnya. Menurut Denzin dalam Moleong (2011:330) ada empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. Adapun triangulasi yang peneliti gunakan yaitu triangulasi sumber.

Tabel 6. Contoh Tabel Triangulasi Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Provinsi Lampung

Fokus Penelitian	Indikator	Sumber Data			Kesimpulan
		Wawancara	Dokumentasi	Observasi	
Standar dan sasaran	Sasaran	Menurut Redi Apridika selaku Perwakilan dari Perbankan (BRI) menyatakan bahwa Sasaran dari Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan <i>Guideline</i>) ini ialah diperuntukkan bagi siapa saja yang mendukung dan menginginkan Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan <i>Guideline</i>). Namun, sasaran khususnya yang menjadi titik fokus Otoritas Jasa Keuangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Perbankan (BRI) dalam membuat program ini adalah	 Foto Masyarakat nelayan yang mengikuti Program Jaring (Jangkau, Sinergi dan <i>Guideline</i>)	Terkait sasaran, peneliti melihat bahwa sasaran dalam program ini sudah tepat. Artinya, selama proses observasi peneliti melihat orang mengikuti program ini merupakan masyarakat nelayan.	Pada indikator sasaran, dapat disebutkan bahwa dengan program ini sudah tepat sasaran yaitu masyarakat nelayan yang ada di Provinsi Lampung, dan diharapkan dengan Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan <i>Guideline</i>) dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan.

		masyarakat nelayan yang ada di Provinsi Lampung. Sehingga harapan dari para agen pelaksana ini atas terselenggaranya Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan <i>Guideline</i>) adalah masyarakat nelayan bisa segera merencanakan mau buka usaha apa dengan modal yang mereka dapatkan dari peminjaman modal di bank.			
--	--	--	--	--	--

Sumber: diolah oleh peneliti, Tahun 2016

c. Kecukupan referensial

Kecukupan referensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku tentang kebijakan publik dan buku sosialisasi akses pendanaan nelayan dan pengembangan Lembaga

Keuangan Bank di PPI, dan Buku Pedoman Program Jaring (Jangkau, Sinergi dan *Guideline*)

2. *Dependability*/kebergantungan atau reliabilitas

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang non-kualitatif. Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi dapat memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan dosen pembimbing.

3. *Confirmability* (Kepastian)

Pengujian kepastian dalam penelitian kualitatif hampir sama dengan uji kebergantungan, sehingga pengujiannya dilakukan peneliti dengan mendiskusikannya kepada dosen pembimbing dan dosen pembahas. Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian.

4. Pengujian keteralihan (*transferability*)

Peneliti ini mendeskripsikan atau memaparkan data yang telah diperoleh, baik berupa hasil wawancara, hasil dokumentasi maupun observasi secara transparan dan mengguraikan secara rinci. Pemaparan ini dirincikan pada bab hasil dan pembahasan. Pemaparan secara keseluruhan data dilakukan agar pembaca dapat benar-benar mengetahui permasalahan yang terjadi terkait dengan penelitian.

BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Provinsi Lampung

Salah satu Provinsi di Indonesia yang mempunyai daerah yang cukup luas adalah Provinsi Lampung. Secara keseluruhan daerah Lampung memiliki luas daratan $\pm 35.288,35 \text{ Km}^2$. Panjang garis pantai Lampung $\pm 1.105 \text{ km}$ (termasuk 69 pulau kecil). Dengan membentuk 4 wilayah pesisir, yaitu pantai barat (221 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), serta Pantai Timur (270 km), serta 184 desa Pantai dengan luas total 414.000 ha. Daerah Lampung memiliki luas perairan pesisir lebih kurang $16.625,3 \text{ km}^2$ sehingga secara keseluruhan Provinsi Lampung memiliki luas wilayah $51.991,8 \text{ km}^2$. Wilayah pesisir laut merupakan pertemuan antara dua fenomena laut, yaitu (laut Jawa dan Samudra Hindia).

Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Ibukotanya terletak di Bandar Lampung. Beberapa pulau termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung, yang sebagian besar terletak di Teluk Lampung, di antaranya: Pulau Darot, Pulau Legundi, Pulau Tegal, Pulau Sebuku, Pulau Ketagian, Pulau Sebesi, Pulau Pahawang, Pulau Krakatau, Pulau Putus dan Pulau Tabuan. Ada juga Pulau

Tampang dan Pulau Pisang di yang masuk ke wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Provinsi Lampung memiliki Pelabuhan utama ternama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Teluk Betung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung. Di teluk Semaka adalah Kota Agung (Kabupaten Tanggamus), dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maranggai dan Ketapang. Di samping itu, Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui.

Merak-Bakauheni merupakan urat nadi penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Laju pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Lampung terkait erat dengan adanya keberadaan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan Prasarana di wilayah pesisir Provinsi Lampung yang telah dirancang secara nasional adalah rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) dan yang dicanangkan oleh masing-masing kabupaten/ kota adalah rencana pembangunan *Water Front City*.

B. Nelayan

Menurut UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti penebar dan pemakai jaring), maupun secara tidak langsung (seperti juru mudi perahu layar, nakhoda kapal ikan bermotor, ahli mesin kapal, juru masak kapal

penangkap ikan), sebagai mata pencaharian. Berikut jumlah masyarakat nelayan di Provinsi Lampung.

Tabel 7. Jumlah Masyarakat Nelayan di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Jumlah
Lampung Timur	3.200
Lampung Tengah	1.700
Lampung Selatan	1.500
Bandar Lampung	2.500
Lampung Barat	1.700
Tulang Bawang	1.500
Tanggamus	2.000
Lampung Utara	1.100
Pesawaran	1.600
Way Kanan	1.000
Pringsewu	250
Tulang Bawang Barat	500
Mesuji	400
Jumlah	25.700

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan Tangkap Tahun 2015

1. Kehidupan Sosial Masyarakat Nelayan Lampung

Secara umum sifat dan karakteristik masyarakat pesisir dipengaruhi oleh beberapa jenis kegiatan seperti:

- a. Usaha perikanan tambak
- b. Usaha perikanan tangkap
- c. Usaha pengolahan hasil perikanan

Usaha-usaha perikanan sendiri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan, musim, dan pasar. Struktur masyarakatnya pun masih sederhana dan belum layak dimasuki oleh pihak luar karena budaya, tatanan hidup, dan kegiatan masyarakatnya relatif homogen dan tiap individu merasa punya kepentingan yang sama dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi hukum yang sudah disepakati bersama.

Selain itu, kehidupan masyarakat pesisir juga menunjukkan gambaran tentang sebuah kehidupan masyarakat yang relatif terbuka dan mudah menerima serta merespon perubahan yang terjadi. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kawasan pesisir merupakan kawasan yang sangat terbuka dan memungkinkan bagi berlangsungnya proses interaksi sosial antara masyarakat dengan pendatang.

Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan masyarakat pesisir sekarang ini, terlihat jelas semakin renggangnya solidaritas dan jalinan ikatan sosial yang ada pada masyarakat pesisir, sebaliknya yang tampak kemudian adalah menguatnya gaya hidup hedonis dan individualisme, khususnya dikalangan generasi muda. Lemahnya solidaritas ini dapat dilihat dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh nelayan.

Kondisi tersebut kemungkinan tidak berlaku bagi masyarakat pesisir di Lampung. Hal itu dikarenakan rasa solidaritas dan jalinan ikatan sosial di tempat ini masih cukup tinggi. Hal ini terlihat pada kehidupan masyarakat pesisir yang ada di Teluk Kiluan, dimana di tempat tersebut terdapat berbagai macam suku dan adat istiadat yang berbada-beda. Mereka juga saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Selain itu, mereka juga bergotong royong dalam menjaga dan mengelola alam secara bijaksana agar terhindar dari kerusakan lingkungan.

2. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Nelayan Lampung

Kehidupan nelayan memang sangat minim dalam hal ekonomi apalagi ketika mereka semat-mata tergantung pada hasil penangkapan ikan di laut. Ketika laut semakin sulit memberikan hasil yang maksimal, maka hal ini merupakan ancaman bagi keberlangsungan kehidupan ekonomi pada masa-masa selanjutnya.

Meskipun dari kegiatan melaut adakalanya memberikan hasil yang melimpah, namun tak jarang pula bahkan seringkali hasilnya hanya bisa menutupi kebutuhan satu hari saja. Sementara untuk esok harinya diserahkan pada hasil tangkapan yang akan dilakukan, demikian seterusnya.

Rendahnya kehidupan ekonomi nelayan ini tidak hanya ditandai oleh banyaknya benda atau materi yang mereka miliki, tapi juga menyangkut masalah ketidakmampuan mereka mengelola masalah keuangan keluarga. Kondisi rumah tangga nelayan biasanya diwarnai oleh pola dan gaya hidup yang belum sepenuhnya berorientasi ke masa depan. Ada beberapa bentuk bantuan ekonomi yang diberikan namun hal tersebut bukan memacu kepada kemandirian dan pemerataan, tapi akhirnya bantuan tersebut hanya dapat di nikmati oleh sekelompok individu atau perseorangan saja.

Berbagai bentuk bantuan dalam rangka peningkatan ekonomi nelayan baik yang diberikan oleh pemerintah maupun LSM ternyata belum mampu menjawab persoalan yang sebenarnya. Banyak bantuan yang akhirnya segelintir orang yang merasakan dan pada akhirnya melahirkan juragan baru di tengah-tengah komunitas nelayan. Bantuan yang diberikan pun cenderung bersifat karitatif, tanpa diiringi oleh upaya membangun kesadaran pada komunitas nelayan itu sendiri. Sehingga yang terjadi adalah bahwa bantuan yang diberikan ibarat memberikan ikan, bukan pancing.

Kehidupan sosial masyarakat pesisir Lampung terutama yang ada di Teluk Kiluan, kondisi seperti ini juga terjadi. Kehidupan masyarakatnya cenderung sederhana dan bercukupan, dimana kepala keluarga hanya memperoleh hasil

pendapatan dengan bermata pencarian sebagai nelayan. Untuk sesekali bila ada wisatawan yang berkunjung mereka juga membantu dalam menyeberangkan wisatawan. Bentuk rumah yang mereka tinggali jag masih snagat sederhana dan bersifat semi permanen. Kapal yang mereka gunakan juga masih sederhana, mereka pun terkadang menyampaikan bahwa sulitnya mengajukan bantuan dana dari pemerintah padahal untuk memenuhi kebutuhan hidup sekarang ini sudah sangat mahal.

3. Kehidupan Kultur Masyarakat Nelayan Lampung

Kehidupan kultur yang mewarnai masyarakat pesisir hingga saat ini sangat erat kaitannya dengan masalah nilai-nilai sikap dan gaya hidup yang akrab dalam kehidupan merka sehari-hari. Kenyataannya ini sedemikian rupa sehingga dijalani setiap hari dan menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya sulit untuk dirubah. Pada akhirnya hal itu menjadi sebuah kewajaran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Salah satu budaya masyarakat nelayan adalah menyangkut gaya hidup. Gaya hidup ini yang adakalnya mengidentifikasi gaya hidup masyarakat di perkotaan, namun tidak sepenuhnya. Hal ini terutama tergambar dari kalangan generasi mudanya. Selain itu, ada pula istilah “biar rumah condong asal gulai balomak”. gamabaran ini memberi makna kurang lebih bahwa meskipun kondisi rumahmu tumbang asalkan tetap makan enak. Ini merupakan sebuah gambaran penilaian yang sering diberikan oleh pihak luar. Gambaran lain tentang masyarakat nelayan adalah kecenderungan untuk hidup boros. Penghasilan hari ini dihabiskan hari ini juga, sehingga akhirnya nelayan tetap berada dalam keadaan yang tidak baik

karena tidak pasti penghasilan yang mereka peroleh dari apakah hari ini atau esok mereka akan memperoleh penghasilan atau tidak terkadang tidak begitu dipikirkan.

Kehidupan kultur seperti yang dijelaskan diatas, tidak begitu terlihat dalam kehidupan masyarakat di Teluk Kiluan karena mereka berusaha untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka dengan berusaha menyekolahkan anak mereka setinggi mungkin dengan harapan bila anaknya berhasil maka mereka dapat membangun Teluk Kiluan agar dapat berkembang menjadi kawasan wisata yang terkenal dan disukai oleh banyak wisatawan seperti kawasan Bali.

C. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik disektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan pemeriksaan dan penyidikan.

Tujuan Otoritas Jasa Keuangan adalah agar secara keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara

berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi Otoritas Jasa Keuangan adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

D. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan instansi Pemerintah Provinsi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 4 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Provinsi tingkat I Lampung. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, yaitu:

Tugas Pokok

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah Provinsi di bidang Kelautan dan

Perikanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonstrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

1. Perumusan kebijaksanaan, pengaturan dan penetapan standar
2. Penyediaan dukungan, pengembangan, perekayasaan teknologi perikanan serta sumber daya perikanan lainnya.
3. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan serta eradikasi penyakit ikan di darat.
4. Penataan dan pengelolaan perairan wilayah laut Provinsi.

Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan Provinsi.

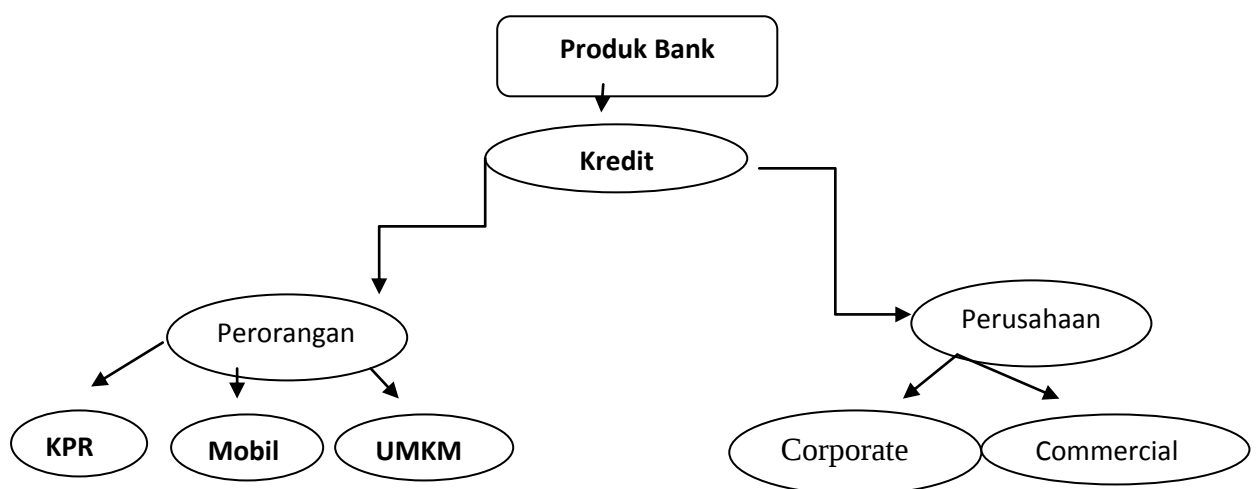
1. Pelaksanaan konservasi dan pelaksanaan plasma nutfah spesifik lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi
2. Pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut urusan Provinsi
3. Pengawasan, pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut urusan Provinsi
4. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi
5. Pelayanan administrasi

E. Perbankan (Bank Rakyat Indonesia)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang tersebar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia

(BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hoofden atau “ Bank Bantuan dan Simpanan Milik kaum Priyayi Purwokerto” suatu kelembagaan keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (Pribumi). Lembaga Tersebut beridiri tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Fungsi Bank Menyalurkan Dana Masyarakat



Gambar 2. Fungsi Bank Menyalurkan Dana Masyarakat

Sumber : dikelola peneliti tahun 2016

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mempunyai Program kredit salah satunya adalah untuk masyarakat nelayan, yang terdiri:

1. KUR Mikro

Syarat-syarat :

- a. Plafond kredit maksimal Rp20 juta
- b. Suku bunga efektif maksimal 22% per tahun
- c. Jangka waktu dan jenis kredit KMK maksimal 3 tahun, KI maksimal 5 tahun

- d. Dalam hal perpanjangan suplesi dan restrukturisasi, KMK maksimal 6 tahun, Kl maksimal 10 tahun
- e. Agunan pokok dapat hanya berupa agunan pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai *cashflow*nya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (Layak). Agunan tambahan sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana.

2. KUR Ritel

Syarat-syarat:

- a. Plafond kredit kurang dari Rp 20 juta s/d Rp 500 juta
- b. Suku bunga efektif maksimal 14% per tahun
- c. Jangka waktu dan jenis kredit KMK maksimal 3 tahun, Kl maksimal 5 tahun
- d. Dalam hal perpanjangan suplesi dan restrukturisasi, KMK maksimal 6 tahun
- e. KL maksimal 10 tahun
- f. Agunan pokok dapat hanya berupa agunan pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai *cashflow*nya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (Layak). Agunan tambahan sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana.

3. KUR Linkage Program (*Executing*)

Syarat-syarat:

- a. Lafond maksimal Rp 2 miliar
- b. Pinjaman BKd, KSP/USP, BMT, LKM ke end user maksimal Rp 100 juta

- c. Jangka waktu dan jenis kredit KMK maksimal 3 tahun, Kl maksimal 5 tahun
- d. Dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi KMK maksimal 6 tahun, Kl maksimal 10 tahun.
- e. Suku bunga bagi lembaga linkage efektif maksimal 14% per tahun, dari lembaga linkage ke UMKM efektif maksimal 22%
- f. Agunan pokok piutang kepada nasabah, tambahan sesuai dengann ketentuan pada Bank Pelaksana.

4. KUR Linkage Program (*Cahnneling*)

Syarat-syarat:

- a. *Plafond* kredit sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel
- b. Jangka waktu dan jenis kredit KMK maksimal 3 tahun, Kl maksimal 5 tahun
- c. Dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi, KMK maksimal 6 tahun, Kl maksimal 10 tahun
- d. Suku bunga sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel
- e. Agunan pokok piutang kepada nasabah, tambahan sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana.

F. Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*)

1. Definisi & Tujuan Program

Program JARING 2015 merupakan program inisiatif jangka pendek OJK (Regulator) dan KKP (Pemerintah) untuk menjangkau sektor kelautan dan perikanan, dengan cara bersinergi dengan Pelaku Jasa Keuangan (PJK) termasuk

asosiasi, dengan sasaran akselerasi pertumbuhan di sektor kelautan dan perikanan melalui pembuatan *Guideline* kepada sektor jasa keuangan dari hulu sampai hilir (*value chain*) serta peran serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. JARING merupakan akronim dari Jangkau, Sinergi dan *Guideline*.

Program JARING 2015 bertujuan menjawab kebutuhan *stakeholders* terhadap informasi tentang *database* Kelautan dan Perikanan, skim pembiayaan, pemetaan risiko bisnis dan dukungan regulasi dari otoritas terkait.

2. Target Dan Sasaran Program

Target utama program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) adalah peningkatan pembiayaan di sektor Kelautan dan Perikanan yang terus bertumbuh serta mendorong perluasan akses masyarakat terhadap sektor jasa keuangan .

a. **Sasaran Jangka Pendek** Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) adalah menyediakan infrastruktur kepada sektor jasa keuangan (SJK) dalam meningkatkan pembiayaan kepada sektor kelautan dan perikanan sebesar lebih dari 50% pada tahun 2015, melalui antara lain:

- 1) Penyediaan data dan informasi yang komprehensif mengenai sektor Kelautan dan Perikanan kepada SJK yang dituangkan dalam bentuk buku berisikan data dan informasi potensi bisnis dan peta risiko, *value chain* bisnis dan skim pembiayaan kepada sektor kelautan dan perikanan. Buku dilengkapi dengan uraian dukungan regulasi dari instansi terkait. Buku tersebut selanjutnya akan disebut Buku JARING.
- 2) Ketersediaan regulasi yang kondusif bagi pembiayaan SJK kepada sektor Kelautan dan Perikanan.

3) Sosialisasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) melalui kegiatan *Kick-Off* Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) dan serangkaian sosialisasi yang dilaksanakan OJK.

b. **Sasaran Jangka Menengah–Panjang** mulai tahun 2016 adalah mendorong peningkatan pembiayaan SJK kepada sektor Kelautan dan Perikanan secara bertahap melalui:

- a) Perluasan pembiayaan ke seluruh sektor maritim, yang mencakup jasa kelautan, transportasi laut, bangunan kelautan, industri maritim, wisata bahari, dan energi dan sumber daya mineral.
- b) Perluasan lembaga jasa keuangan sebagai partner program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*).
- c) Peningkatan kemampuan SDM Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), nelayan, dan SJK melalui pelatihan bersertifikat yang diselenggarakan oleh OJK Institute.
- d) program edukasi dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat, khususnya di sektor kelautan dan perikanan, terhadap produk dan jasa dari SJK.

3. Manfaat Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*)

Manfaat Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) dalam rangka mendukung kemandirian dan kedaulatan sektor kemaritiman meliputi:

- a. Peningkatan inklusi keuangan, yaitu peningkatan akses masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah terhadap sistem atau industri keuangan;

- b. Stimulasi SJK untuk memberikan kredit melalui pendalaman pengetahuan SJK terhadap Sektor KP yang selama ini dianggap memiliki risiko tinggi sehingga pembiayaan kepada sektor ini masih belum tinggi;
- c. Peningkatan kesejahteraan nelayan (peningkatan *income* perkapita);
- d. Peningkatan jumlah lapangan kerja dan mengurangi pengangguran
- e. Peningkatan cadangan devisa.

4. *Progress Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline)*

- a. *Acara Press Conference* di lokasi *cold storage*.
 - 1) Dalam Peluncuran Program JARING, 8 Bank Partner dan 2 asosiasi IKNB juga melakukan penyerahan Perjanjian Kredit kepada debitur sektor Kelautan dan Perikanan di wilayah Sulawesi Selatan dalam rangka realisasi komitmen dalam Program JARING.
 - 2) Program Bank Partner dalam rangka pelaksanaan komitmen peningkatan kredit Program JARING meliputi:
 - a) BRI menyediakan KUR Mikro mulai tanggal 25 Mei 2015 dengan target Rp1,2 triliun khusus untuk KP. BRI membentuk Divisi Pangan dengan dukungan 937 orang AO yang antara lain menangani pembiayaan KP dan melaksanakan uji coba Kartu BBM Nelayan BRI untuk BBM bersubsidi.
 - b) BNI akan melaksanakan program pembiayaan secara kemitraan, khususnya di Tegal. BNI juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan KKP tahun 2010 sehingga penyaluran pembiayaan KP dilaksanakan melalui kerja sama dengan dinas KP di daerah.

- c) Danamon melaksanakan program secara bertahap mengingat Danamon saat ini sedang membangun kemampuan dan kapasitas dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor KP. Danamon melakukan pembekalan dan sosialisasi ke 100 KCP-DSP dengan minimal 200 AO khusus untuk pembiayaan KP.
- d) Bank Mandiri telah melaksanakan *pilot project* pembiayaan sektor budidaya bandeng di Juwana, Pati dengan sistem *ballot payment* (pembayaran angsuran dan pokok dilaksanakan di bulan ke-6). Target KUR Mikro 2015 Bank Mandiri minimal 5% disalurkan ke sektor KP, yaitu sebesar Rp112,5 miliar. Selain itu, Bank Mandiri menyalurkan pembiayaan dari segmen lainnya, yaitu *business banking* dan *commercial* yang sebagian besar disalurkan ke sub sektor pengolahan perikanan tangkap.
- e) Internalisasi Program Jaring BTPN telah dilaksanakan melalui sosialisasi kepada divisi dan pimpinan cabang di daerah. Konsep pembiayaan yang dilaksanakan BTPN adalah *suppy chain*, yaitu pembiayaan debitur dilakukan sampai dengan level suplier.
- f) Skala perusahaan debitur Bank Permata adalah perusahaan menengah mengingat keterbatasan infrastruktur dan SDM. Bank Permata belum banyak memberikan pembiayaan ke sektor KP namun Bank Permata berkomitmen untuk dapat memenuhi target yang ditetapkan dgn prospek pembiayaan berlokasi di Makassar, Bandung dan Pontianak.
- g) Bank Bukopin telah melaksanakan pembiayaan pola *close-system* yang merupakan pola kerja sama membentuk rantai bisnis (dari pembibitan

sampai pengolahan) termasuk lembaga penjamin kredit dalam rangka mencapai target pertumbuhan pembiayaan sektor KP sebesar Rp81 miliar pada tahun 2015. Masing-masing pihak dalam pola *close-system* tersebut memberikan *fund-sharing* dalam rangka mitigasi risiko pembiayaan.

- h) BPD Sulselbar telah meluncurkan produk Pundi Usaha Rakyat (PUR) Kemitraan, yang antara lain disalurkan kepada debitur sektor KP yang *feasible* tapi belum *bankable* tanpa agunan

b. Ketentuan Perbankan : yang Mendukung Pelaksanaan Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*)

- a) Kewajiban Porsi Penyaluran Pembiayaan Produktif
- b) Kewajiban Penyaluran Pembiayaan pada UMKM
- c) Kualitas Aset Produktif Dikaitkan dengan Penjaminan Pemerintah
- d) Batas Maksimum Pemberian Kredit
- e) Komitmen Pemegang Saham Untuk Mendukung Sektor Prioritas.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pelaksanaan Program Jaring (*Jangkau, Sinergi, dan Guideline*) dengan menganalisis Program Jaring (*Jangkau, Sinergi, dan Guideline*) Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil serta pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Jaring (*Jangkau, Sinergi, dan Guideline*) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan sasarannya pun sudah tepat yaitu masyarakat nelayan. Namun, terkait standar, dalam pelaksanaan program ini. Nota Kesepahaman standar yang benar-benar jelas yang menjadi tolak ukur keberhasilan program. Hal ini dikarenakan Program Jaring (*Jangkau, Sinergi, dan Guideline*) merupakan Program himbauan sehingga tidak ada *Standar Operating Procedure* dan payung hukum.
2. Melihat ketersediaan sumber daya yaitu sumber daya manusia dan sumberdaya finansial, dimana sumber daya manusia masih harus mengalami perbaikan dari segi kuantitasnya. Terkait sumber daya finansial juga masih

perlu mendapatkan perhatian lebih, karena ketersediaan anggaran yang ada sangat minim.

3. Terkait hubungan organisasi antara otoritas jasa keuangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Perbankan (BRI) yang bergabung untuk melaksanakan program ini menjalin hubungan yang sangat baik dan selalu ada koordinasi antara pembuat program, pelaksana dan penyaluran kreditnya sehingga mengakibatkan tidak adanya miss komunikasi yang dapat menimbulkan permasalahan besar.
4. Masalah karakteristik agen pelaksana, Dinas kelautan dan Perikanan tidak memiliki SOP, namun hanya saja implementor sebagai Pegawai Negeri Sipil harus mentaati aturan-atura yang dibuat oleh pemerintah. Implementor yang ada selama ini sudah cukup mematuhi aturan yang ada,namun kepatuhan itu harusnya lebih ditingkatkan lagi agar tingkat kedisiplinan implementor lebih baik yang terdapat didalam Nota Kesepahaman.
5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik juga turut menjadi variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi sosial ekonomi memiliki pengaruh dalam pelaksanaan program ini, karena sebagian besar masyarakat yang hadir dalam program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) adalah masyarakat nelayan yang memang menginginkan program ini namun terkendala pada biaya dan prosedur persyaratan untuk mengajukan pengkredittan Di dalam kondisi sosial ekonomi politik juga sangat berpengaruh untuk berjalannya program ini.
6. Sejauh ini program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) telah dipahami oleh implementor dengan baik, dimana implementor telah memahami apa

yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) di Provinsi Lampung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang berjudul “Implementasi Program (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Provinsi Lampung”, maka saran dari peneliti yaitu:

1. Perlu dibuatnya standar yang lebih rinci dan jelas lagi terkait pelaksanaan Program (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) yang dapat menjadi pedoman pelaksanaannya agar tidak terjadi multiinterpretasi pada program ini.
2. Perlu adanya peningkatan kerjasama (*team work*) antara Petugas bagian pencairan dana peminjaman modal usaha Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) untuk saling membantu hasil Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) dengan melihat berbagai aspek kehidupan dan kepentingan bersama.
3. Perlu adanya peningkatan sumber daya finansial yang dapat menunjang keberhasilan program serta tercapainya sarana prasarana yang memadai dengan cara meningkatkan anggaran untuk melaksanakan program ini.
4. Dalam pelaksanaan Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) masih mengalami kekurangan staff atau sumber daya manusia untuk mensosialisasikan program ini lebih luas lagi, maka dari itu sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan menambah lagi sumber daya manusia yang bertugas di lapangan dengan cara merekrut

pegawai baru, serta perlu diadakannya peningkatan kualitas atau mutu dari setiap implementor dengan memberikan pelatihan-pelatihan.

5. Membuka ruang komunikasi publik yang luas agar Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) ini dapat tersosialisasi dengan baik, serta kejelasan program di tiap metode hingga pada efek samping dapat diketahui oleh para nelayan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengadaan sosialisasi antara Otoritas Jasa Keuangan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Perbankan (BRI).
6. Membuat forum komunikasi dan dialog antara masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Perbankan (BRI). beserta perwakilan ulama dan tokoh masyarakat yang ada, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya mengikuti Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) supaya tidak menimbulkan *miss* komunikasi yang dapat menghilangkan isu-isu negatif tentang Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*, Jakarta : Salemba Humanika.
- , 2004. *Kebijakan Publik*, Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UGM Press.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Mardianto, Prof. Dr. Ir. Totok, M.S,dkk. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: sage Publication
- Moloeng, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D. Riant. 2008. *Public Policy*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Kelompok Gramedia.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan V Desember 2010, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisa Kebijakan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta.
- Sulistio, Eko Budi. 2012. *Buku Ajar Kebijakan Publik (Public Policy): Kerangka Dasar Studi Kebijakan Publik*.

Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gova Media.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: C A P S.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Undang – undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Dkplampung.hol.es/sejaraj/dinas-Kelautan-dan-Perikanan-provinsi-lampung.diaksestanggal22Oktober2016)

<http://dhizzztie.wordpress.com/2011/05/09/kehidupan-masyarakat-pesisir-lampung>.diakses12Oktober2016)

<http://seputarlampung.co.id/program-jaring-untuk-pengembangan-kelautan-dan-perikanan/>diakses5/10/2015:16.00)

www.ojk.go.id/kanal/perbankan/tentang-perbankan/pages/tugas.aspx.diaksestanggal12Oktober2016)

Pesisirlampung.blogspot.co.id/2011/05/potensi-sumber-daya-alam-pesisir.html?m=1. diakses tanggal12Oktober2016)